

**KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK DI SURIAH PASCA  
HILANGNYA KEKUASAAN ISIS TAHUN 2014-2019  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**RIEFCA NAHAR AMALIA**

17323115

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK DI SURIAH PASCA**

**HILANGNYA KEKUASAAN ISIS TAHUN 2014-2019**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**RIEFCA NAHAR AMALIA**

17323115

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024  
HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK DI SURIAH PASCA  
HILANGNYA KEKUASAAN ISIS TAHUN 2014-2019**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal  
23 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

1. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
2. Mohammad Rezky Utama, S.I.P., M.A.
3. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

## **PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 22 Agustus 2024*



*Riefca Nahar Amalia*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b>	1
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	3
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b>	4
<b>DAFTAR ISI</b>	5
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	7
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	8
<b>ABSTRAK</b>	9
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	10
<b>1.1 Latar Belakang</b>	10
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	14
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b>	14
<b>1.4 Cakupan penelitian</b>	15
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	16
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b>	18
<b>1.7 Argumen Sementara</b>	21
<b>1.8 Metode Penelitian</b>	22
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	22
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	22
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	22
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	22
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b>	23
<b>BAB 2</b>	24
<b>2.1. Tataan Domestik Turki</b>	24
<b>2.2. Dinamika Hubungan Turki dengan Kawasan Timur Tengah</b>	30
<i>2.2.1. Konflik Suriah bagi Turki</i>	30
<i>2.2.2. Negara Timur Tengah di Suriah</i>	34
<b>BAB 3</b>	42
<b>3.1. Keberadaan Negara Kawasan Sekitar Turki</b>	42
<i>3.1.1 Timur Tengah dan Afrika</i>	43
<i>3.1.2 Timur Tengah, Asia dan Australia</i>	44
<i>3.1.3 Timur Tengah dan Eropa</i>	45
<i>3.1.4 Timur Tengah dan Benua Amerika</i>	51

<b>3.2. Kekuatan Global dalam Konflik Suriah</b>	52
3.2.1 <i>Peran Amerika Serikat dalam Konflik Suriah</i>	52
3.2.2 <i>Peran Rusia dalam Konflik Suriah</i>	56
3.2.3 <i>Peran Shanghai Cooperation Organization dalam Konflik Suriah</i>	60
<b>BAB 4</b>	62
<b>2.1. Kesimpulan</b>	62
<b>2.2 Rekomendasi</b>	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	66

## **DAFTAR GRAFIK**

**Tabel 2.2.2.1 Struktur Organisasi ISIS tahun 2014**

24

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2.1.1 Peta Turki**

16

## ABSTRAK

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik internal yang terjadi antara pemerintahan Suriah dengan masyarakat Suriah atas ketidaksenangan masyarakat Suriah dengan rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Konflik Suriah terjadi mulai tahun 2011 yang melibatkan beberapa negara. Salah satu negara yang terlibat ialah Turki. Penulis ingin mengetahui apa kepentingan Turki hingga memutuskan terlibat dalam konflik Suriah pasca tergulingnya ISIS pada tahun 2014 hingga 2019 dengan menggunakan teori Regional Security Complex oleh Barry Buzan. Keputusan Turki untuk terlibat dalam konflik Suriah karena wilayah Tenggara Turki yang berbatasan dengan Suriah Utara yang menjadi lintasan yang dilewati oleh negara lain yang terlibat dalam konflik. Upaya yang dilakukan Turki untuk mempertahankan negaranya. Adapun faktor lain yang membuat Turki ikut serta dengan adanya keinginan pemerintah Turki mengusir etnis Kurdi di negaranya. Karena etnis Kurdi merupakan kelompok yang membantu rezim Bashar Al-Assad dalam terjadinya konflik di Suriah.

**Kata-kata kunci:** Turki, Suriah, Kurdi, ISIS, Bashar Al-Assad, Regional Security Complex

## ABSTRACT

The conflict in Syria was an internal conflict that occurred between the Syrian government and the Syrian people due to the Syrian people's displeasure with the regime of Bashar Al-Assad. The Syrian conflict began in 2011 involving several countries. One of countries involved is Türkiye. The author wants to know what Türkiye interest were until decide to get involved in the Syrian conflict after the overthrow of ISIS in 2014 to 2019 using Regional Security Complex Theory by Barry Buzan. Türkiye decision to get involved in the Syrian conflict was because the region of southeast Turkey which borders northern Syria became a route passed by other countries involved in the conflict. Türkiye effort to defense its country. Another factor that made Türkiye participate was the Türkiye government desire to expel the Kurds from their country. Because the Kurdish ethnic group is a group that helps the regime of Bashar Al-Assad in the conflict in Syria.

**Keywords:** Türkiye, Syria, Kurdish, ISIS, Bashar Al-Assad, Regional Security Complex

## BAB 1

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hubungan internasional adalah studi tentang ilmu politik persoalan-persoalan luar negeri dan isu global diantara negara-negara dalam sistem internasional. Peran negara dalam organisasi non pemerintah dan perusahaan multinasional. Selain menggunakan ilmu politik dalam kajian hubungan internasional juga mengkaji dalam bidang ekonomi dan kebijakan luar negeri dalam negara-negara tertentu. Dalam konteks hubungan internasional terdapat kerjasama bilateral dan multilateral dalam kepentingan nasional setiap negara. Hubungan Internasional mencakup dari globalisasi, perkembangan ekonomi, terorisme, dan hak-hak asasi manusia serta dalam kedaulatan negara.

Pemberontakan yang terjadi di Suriah berlangsung sejak tahun 2011, sama halnya dengan kejadian Arab Spring. Pemberontakan yang terjadi di Suriah akibat dari ketidaksenangan warga Suriah terhadap pemerintahan Presiden Bassar Al-Assad. Pemberontakan yang dimulai pada tahun 2011 karena ketidakpuasan warga Suriah dengan pemerintah Suriah, kemudian masyarakat di Suriah melakukan demonstrasi dengan tujuan agar Presiden Bassar Al-Assad segera turun dari jabatannya. Namun setelah demonstrasi berlangsung, respon yang diberikan oleh pemerintah Suriah tidak sesuai dengan harapan masyarakat yaitu dengan melakukan penyerangan dengan cara menembakkan peluru kepada masyarakat Suriah saat sedang berlangsungnya demonstrasi (Rini n.d.).

Beberapa faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perang saudara di Suriah yaitu karena terlalu lamanya pemerintah Suriah yang dipimpin oleh

Presiden Bassar Al-Assad. Selain itu beberapa faktor yang membuat masyarakat Suriah melakukan demonstrasi ialah karena banyaknya angka pengangguran yang ada di Suriah itu sendiri. Konflik yang terjadi di Suriah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Pemberontakan di Suriah menyebabkan keterlibatan dengan berbagai negara. Keterlibatan negara yang berada di kawasan sekitar Suriah kawasan Timur Tengah seperti Turki, Iraq, Iran, Arab Saudi. Adapun negara kawasan Eropa yang terlibat seperti Uni Eropa. Tidak hanya kawasan sekitar Suriah saja, namun konflik di Suriah menjadi isu internasional yang melibatkan kekuatan global dalam konflik tersebut seperti keterlibatan negara Amerika Serikat dan Rusia. Keterlibatan beberapa negara dalam konflik di Suriah memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah tersebut karena memporak-porandakan pemerintah Turki dalam faktor ekonomi, yang mana jalur perdagangan Turki dengan Arab Saudi berdekatan dengan Suriah sehingga menyebabkan perekonomian di Turki menurun akibat perang yang terjadi di Suriah (Abdurrah n.d.).

Konflik yang terjadi di Suriah disebabkan oleh kesenjangan ekonomi seperti produksi minyak, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan cuaca ekstrim yang sangat panas sehingga berdampak dalam sektor pertanian. Pada saat terjadi kesenjangan ekonomi di Suriah, kemudian muncul isu Suni-Syiah yang ingin memecah belah negara Suriah, sehingga menyebabkan pemerintah Suriah yang awalnya hanya berfokus pada militer untuk menghadapi perang yang terjadi di negaranya, sehingga berdampak dalam perekonomian masyarakat Suriah dalam berbagai sektor. Konflik di Suriah merupakan konflik yang menyebabkan

perselisihan besar antar negara Rusia dengan Amerika Serikat. Rusia merupakan salah satu negara yang mendukung keberadaan Presiden Bassar Al-Assad, sedangkan Amerika Serikat adalah negara pemberontak konflik Suriah. Oleh sebab itu, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama membentuk Badan Intelijen Amerika Serikat yaitu *Central Intelligence Agency* atau disebut dengan CIA. CIA merupakan pelatihan militer yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pemberontakan konflik di Suriah yang menentang untuk menurunkan Presiden Bassar Al-Assad dari jabatannya.

Amerika Serikat menjadi oposisi di Suriah dalam konflik yang terjadi dengan melakukan berbagai penyerangan. CIA yang dibentuk sebagai pelatihan militer bersenjata mempunyai anggota 5.000 masyarakat sipil Suriah yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 2014, Amerika Serikat menyerang ISIS. Pada tahun 2011 Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Presiden Bassar Al-Assad merupakan pemimpin dictator yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil Suriah dengan menembakkan senjata. Sehingga Amerika Serikat membuat perjanjian multilateral dengan Presiden Bassar Al-Assad untuk melindungi masyarakat sipil Suriah dari serangan gencatan senjata serta penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah (Danar Hafidz n.d.).

Arab Spring yang terjadi di Suriah. Arab Spring memiliki arti kegiatan demonstrasi yang dibuat oleh masyarakat Arab atau disebut juga dengan kebangkitan bangsa Arab dalam melawan pemerintah yang otoriter. Protes yang dilakukan melalui Arab Spring oleh demonstran yaitu dengan membuat platform di social media dan menyebarluaskan berita agar diketahui oleh internasional

konflik yang sedang terjadi di Suriah. Demonstran juga melakukan unjuk rasa di sepanjang jalanan yang bertujuan agar masyarakat sipil mendapatkan keadilan dan perubahan dalam sistem di Pemerintahan Suriah.

Keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah menjadi sorotan oleh Turki, Amerika Serikat dan Arab Saudi. Rusia merupakan Negara yang mendukung rezim pemerintahan Suriah masa Presiden Bassar Al-Assad. Rusia berpartisipasi dalam konflik Suriah untuk melindungi Bassar Al-Assad dengan memanfaatkan kedekatan politik kedua negara antara Rusia dan Suriah pada era Uni Soviet. Rusia menjadikan Suriah sebagai partner untuk menyerang sekutunya yaitu Amerika Serikat. Peran Rusia dalam keterlibatan konflik di Suriah dengan cara melindungi perekonomian di Suriah dalam aset perdagangan dan sistem investasi. Rusia menyebutkan akan menjaga kawasan Suriah dari pengaruh Negara Timur Tengah. Diplomasi tersebut dibuat karena adanya kepentingan nasional Rusia dalam upaya melindungi negaranya dari serangan lawannya sekutu Amerika Serikat.

Dampak konflik yang terjadi di Suriah dengan muncul berbagai gerakan islam radikal dalam beberapa negara yang terhubung ISIS. ISIS membentuk pasukan tempur dengan kekuatan militer untuk menguasai wilayah Irak yang berbatasan dengan Suriah yang disebut wilayah Deir Al-Zour. Intervensi daerah dan sumber penghasilan yang ada di Suriah dapat berjalan dengan lancar karena adanya dukungan dari berbagai negara serta badan intelijen negara yang kontra dengan Suriah yang membantu berupa dalam bentuk pendanaan untuk kelompok ISIS digunakan untuk melakukan intervensi. Begitu juga dengan sumur minyak dan laporan pembelian minyak mentah di Suriah yang berhasil dikuasai oleh ISIS.

Pada Februari tahun 2013 muncul adanya gerakan yang menginfiltrasi ISIS, kelompok organisasi baru dibawah pimpinan Al-Qaeda dan Aiman Zawahiri yang diberi nama Kelompok Anshar Islam Sunni. Pembentukan kelompok Islam Anshar Sunni merupakan gagasan dari Al-Qaeda akibat adanya konflik yang terjadi di Suriah dan keterlibatan ISIS adalah illegal karena tidak adanya penanggung jawab dari negara Irak itu sendiri untuk melakukan intervensi ke negara lain. Dengan adanya kelompok Islam Anshar Sunni membuat ISIS tergugah untuk melakukan pemberontakan kepada kelompok tersebut, maka terjadinya penyerangan kelompok Islam Anshar Sunni akibat dari ketidaksanggupan ISIS dalam mengendalikan diri dengan berbagai ancaman. Keberadaan ISIS dalam konflik Suriah membuat kekacauan yang mengkhawatirkan di Dunia Internasional. Sehingga membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta gabungan dari berbagai negara-negara besar untuk membantu menggulingkan ISIS dalam keterlibatan konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2015. Sehingga pada tahun 2019 Dewan Keamanan PBB dengan mendapatkan bantuan dari berbagai negara yang mendukung dalam proses penggulingan ISIS mampu berhasil mengalahkan keberadaan ISIS di wilayah Suriah. Kebijakan Politik Luar Negeri Turki merupakan intervensi militer dengan berusaha menggulingkan ISIS (Tambunan n.d.).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana posisi Turki di Timur Tengah pada isu konflik Suriah dilihat dari *Regional Security Complex Theory*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dari keterlibatan pemerintah Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2014 hingga tahun 2019 pasca hilangnya kekuasaan ISIS. Kepentingan pemerintah Turki dalam konflik Suriah untuk memperbaiki perekonomian di Turki. Pada waktu terjadinya konflik Suriah, Turki merupakan negara yang menerima efek negatif karena jalur perdagangan di wilayah Turki ditutup. Banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja sehingga membuat pendapatan ekonomi pemerintah Turki menurun.
2. Dengan adanya penelitian ini, penulis bertujuan agar tulisan ini dapat dijadikan referensi dalam memperluas wawasan ilmu mengenai konflik internasional khususnya yang mengambil studi Hubungan Internasional. Penelitian ini memberikan informasi mengenai keterlibatan Turki dalam konflik Suriah dari tahun 2014 hingga tahun 2019 dan pasca hilangnya kekuasaan ISIS.

### **1.4 Cakupan penelitian**

Dengan adanya penelitian ini yang akan berfokus pada perspektif Turki atas keterlibatannya dalam konflik Suriah pasca hilangnya kekuasaan ISIS, maka dapat mengetahui maksud dari keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui sebab awal mula terjadinya konflik Suriah pada tahun 2014 hingga runtuhnya kekuasaan ISIS dan

berlangsungnya konflik Suriah yang terjadi selama 6 tahun dari tahun 2014 hingga ke tahun 2019, dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang mengubah tatanan prioritas dan kepentingan negara di kawasan tersebut. Pada penelitian ini penulis juga ingin meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah Turki dengan tujuannya dalam keterlibatan konflik yang terjadi di Suriah. Dan hal-hal yang terkait dalam keterlibatan pemerintah Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk membandingkan dengan hasil penelitian lain, agar tidak meneliti kembali atau terjadi plagiasi. Penulis menemukan beberapa penelitian sebagai pembanding. Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Sahla Rizki Deovanka dan Ibnu Zulian berjudul “*Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat dan Rusia dalam konflik Suriah (2013-2018)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Amerika Serikat merupakan negara yang menolak kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad dengan menunjukkan sikap bertentangan dengan pemerintah yang menyerang ISIS dan memberikan pelatihan militer untuk masyarakat sipil Suriah dalam peluncutan senjata. Sedangkan Rusia merupakan negara yang mendukung kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad dengan melindungi kawasan Suriah dan menstabilkan perekonomian Suriah di bidang perdagangan dan investasi (Sahla Rizki, 2020).

Penelitian kedua berjudul “*Dinamika Perang Suriah : Aktor dan Kepentingan*” yang ditulis oleh Syarif Bahaudin Mudore dan Nurlaila Safitri

menjelaskan bahwa beberapa aktor yang berperan dalam konflik Suriah seperti Presiden Bashar Al-Assad, Rusia, Iran, Turki, Kurdi, Amerika Serikat, dan Kelompok oposisi pemberontak. Diplomasi yang terjalin antara Iran dengan Suriah memiliki peran yang saling membantu untuk mengecam Israel. Dengan adanya hubungan baik tersebut Iran dan Rusia melawan Amerika Serikat dalam pemberontakannya kepada Bashar Al-Assad. Sedangkan keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah karena Turki memiliki perjanjian bilateral dengan Suriah yang berisi mengenai diplomasi politik dan ekonomi. Peran Kurdi sebagai aktor penting dalam konflik Suriah sebab adanya beberapa etnis Kurdi yang tinggal di daerah Suriah Utara. Namun, Kurdi lebih berpihak kepada Amerika Serikat karena Amerika Serikat memberikan bantuan kepada etnis kurdi yang ada di Suriah (Syarif, 2019).

Pada penelitian ketiga yang ditulis oleh Dwi Suta Mentari Rendra berjudul "*Keterlibatan Turki dalam Konflik Suriah pada Tahun 2011-2012*". Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2011 konflik yang terjadi di Suriah memberikan dampak positif bagi Turki. Namun seiring berjalannya waktu, pada Agustus 2011 perkembangan di Suriah semakin memburuk sebab konflik yang terjadi di Suriah merupakan masalah internal di Pemerintahan. Faktor yang mendorong keterlibatan Turki akibat kerugian ekonomi pemerintah Turki dalam bidang ekspor dan impor Turki dengan Suriah pada tahun 2009-2010. Angka penurunan ekspor yang tinggi memporak-porandakan perekonomian Turki. Pada tahun 2011-2012 ekspor dan impor Turki dengan Suriah mengalami penurunan Kembali sebesar 80%. Tidak hanya dalam bidang perdagangan, konflik di Suriah juga menyebabkan penurunan pada sektor pariwisata. Dalam sektor wisata,

wisatawan Suriah di Turki mengalami penurunan sebesar 33.1% sehingga membuat Turki membentuk kebijakan dalam menuntut demokrasi agar perekonomian Turki segera pulih Kembali (Rendra, 2017).

Dalam ketiga jurnal tersebut digunakan penulis sebagai pembanding dalam tinjauan pustaka, penulis menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Suriah akibat adanya diplomasi politik dari beberapa aktor negara. Ada beberapa yang mendukung pemerintahan masa Presiden Bashar Al-Assad, dan menjadi oposisi dalam konflik di Suriah. Penulis menemukan poin pembanding dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis ialah keterlibatan Turki yang akan dijelaskan penulis pada penelitiannya pada tahun 2014 hingga 2019 dan pasca runtuhnya kekuasaan ISIS. Sedangkan dalam beberapa penelitian yang sudah ada, menjelaskan dinamika konflik di Suriah dengan dampaknya. Konflik yang terjadi di Suriah melibatkan beberapa negara sehingga menjadi isu internasional yang menjadikan banyak negara lain yang tidak terlibat melakukan negosiasi agar konflik di Suriah selesai.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan *regional security complex theory* sebagai analisis dalam sebuah penelitian studi kasus yang diambil. Menurut penulis, *regional security complex theory* menjadi teori yang relevan dari konflik yang terjadi. *Regional security complex theory* merupakan pola keamanan internasional dalam perspektif regional hubungan antar negara secara geografis (Paul 2007).

***Regional Security Complex Theory menurut Barry Buzan dan Ole Waever terbagi menjadi empat :***

- a. *Vulnerability of state* atau kerentanan tatanan domestik dan korespondensi antar bangsa dan negara khususnya regional domestik merupakan suatu negara yang kuat atau negara yang lemah menurut Barry Buzan. Sedangkan menurut Ole Waever dalam suatu negara, keamanan yang dimiliki terkadang membuat ancaman struktural bagi negara lain meskipun negara tersebut tidak memiliki niat untuk berselisih.
- b. *State-to-state relations* atau hubungan dengan negara sekitar. Hubungan ini menjelaskan keterkaitan dengan negara-negara sekitar yang kemudian menunjukkan dinamika kawasan.
- c. *The region's interaction with neighboring regions* atau interaksi satu kawasan dengan kawasan sekitarnya. Hubungan ini menjelaskan batas keterkaitan hubungan kawasan dengan kawasan lain, termasuk apabila ada hubungan yang timpang atau asimetris dengan kawasan lain (tidak termasuk pada pengaruh kekuatan di level global).
- d. *The role of global powers in the region* atau peran kekuatan global dalam interaksi antara struktur keamanan global dan regional.

Perspektif *regional security complex theory* dalam Hubungan Internasional menjelaskan bahwa dalam tingkat regional kawasan menjadi paling dominan. Namun dalam keempat perspektif *regional security complex theory* oleh Barry Buzan dan Ole Waever memiliki konstelasi peran keamanan secara bersamaan yang seimbang. Faktor domestik yang mendominasi konstelasi keamanan regional dan global mempunyai pengaruh yang signifikan. *Regional*

*security complex theory* memiliki tujuan untuk menjadikan teori tersebut sebagai tolak ukur yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi perubahan dalam tingkat regional.

***Struktur penting Regional Security Complex Theory mencakup empat variabel :***

- a. *Boundary* atau batas, yang membedakan *regional security complex* dari kawasan negara lain.
- b. *Anarchic structure* atau struktur anarkis, yang berarti bahwa *regional security complex* terdiri dari dua atau lebih aktor kawasan.
- c. *Polarity* atau polaritas, yang mencakup distribusi kekuasaan di antara unit.
- d. *Social construction* atau konstruksi sosial, yang mencakup pola persahabatan dan persaudaraan antar unit.

Perspektif *regional security complex theory* yang dikemukakan oleh Barry Buzan membentuk sebuah gagasan subkompleks dalam regional domestik yang memiliki definisi yang sama dengan *regional security complex* lainnya. Subkompleks *regional security complex theory* merupakan pola saling ketergantungan keamanan yang berbeda-beda dalam mendefinisikan secara keseluruhan. Seperti halnya isu internasional yang termasuk dalam subkompleks *regional security complex theory* ialah kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Israel, Yordania, Lebanon, Suriah. Serta negara kawasan lain dari Teluk Iran dan Irak.

Dari penjelasan tersebut, penulis meneliti sebuah penelitian dengan menggunakan *regional security complex theory* dari Barry Buzan yang mengutip

beberapa asumsi sebagai panduan dalam penggunaan teori dalam hubungan internasional pada kerangka pemikiran penelitian. Keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2014 hingga 2019 pasca hilangnya kekuasaan ISIS merupakan sebuah kepentingan nasional dari pemerintah sehingga menarik untuk diteliti.

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini yang mencantumkan rumusan masalah "*Bagaimana posisi Turki di Timur Tengah pada isu konflik Suriah dilihat dari Regional Security Complex Theory?*" yang bertujuan bahwa penulis ingin meneliti dengan memberi sebuah jawaban yang relevan dengan penyebab konflik. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan masalah internal antara masyarakat sipil dan pemerintah. Perang saudara terjadi karena adanya kebijakan pemerintah Suriah yang otoriter pada masa Presiden Bashar Al-Assad. Konflik tersebut melibatkan beberapa aktor negara, baik yang mendukung maupun menolak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *Regional Security Complex Theory* oleh Barry Buzan dalam membuat analisis dengan berdasarkan tatanan domestik dalam pemerintah, hubungan antar negara kawasan sekitar, interaksi hubungan antar negara sekitar dan peran kekuatan global dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Rusia menjadi negara yang mendukung pemerintah Suriah, sedangkan Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang menolak kepemimpinan Bashar Al-Assad dengan menggunakan kekuatan militer yang diberikan kepada masyarakat sipil Suriah untuk melakukan pemberontakan. Berbeda dengan Turki, konflik di Suriah membuat Turki berdampak dalam sektor ekonomi dan

keamanan nasional semakin menurun. Untuk kerentanan stabilitas domestik terkait pemberontakan suku Kurdi ditambah perlunya meningkatkan legitimasi pemerintah Erdogan, hubungan kawasan antar negara yang menjelaskan kondisi Suriah dan keterkaitannya dengan Turki. Interaksi dengan negara kawasan terkait hubungannya dengan NATO dan pengaruhnya pada Turki, serta peran kekuatan global yang menunjukkan pengaruh Amerika Serikat dan Rusia dalam mempengaruhi keputusan Turki tersebut.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Metode tersebut pada umumnya digunakan oleh peneliti dalam lingkup ilmu sosial, ilmu politik serta dalam hubungan internasional karena pengumpulan data yang diambil data non-numerik.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dan objek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, penulis mengambil Turki dalam penentuan subjek penelitian. Sedangkan objek penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Turki untuk terlibat dengan konflik yang terjadi di Suriah.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder yang berbasis pada internet menggunakan buku, jurnal artikel ilmiah dan beberapa informasi yang ada di berita.

#### *1.8.4 Proses Penelitian*

Pada proses penelitian penulis akan menganalisis data dengan menggunakan konsep dan teori Hubungan Internasional untuk menjelaskan kejadian yang diteliti oleh penulis. Metode yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan terjadinya konflik di Suriah dengan keterlibatan Turki dalam konflik serta keadaan konflik Suriah pasca hilangnya kekuasaan ISIS pada tahun 2014 hingga tahun 2019.

### **1.9 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

**Bab I**, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II**, berisi mengenai analisis dinamika keamanan Turki di level domestik dan hubungan negara sekitar di kawasan Timur Tengah.

**Bab III**, berisi mengenai analisis dinamika keamanan Turki di kawasan sekitar, dalam kawasan Eropa serta peranan kekuatan global kawasan Amerika Serikat dan Rusia.

**Bab IV**, berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditulis oleh penulis.

## **BAB 2**

### **ANALISIS DINAMIKA KEAMANAN TURKI DI LEVEL DOMESTIK DAN KAWASAN TIMUR TENGAH**

Dalam bab ini menjelaskan analisis mengenai dinamika keamanan regional Turki dan keamanan kawasan Timur Tengah berdasarkan dalam indikator konsep *Regional Security Complex Theory*. Poin yang dibahas dalam bab ini adalah *vulnerability of state* atau kerentanan stabilitas tatanan domestik yang menjelaskan mengenai pemerintah Turki dan *state-to-state* atau hubungan domestik negara kawasan sekitar yang menjelaskan mengenai hubungan diplomasi Turki dengan negara kawasan sekitar Turki seperti Iraq, Iran, dan Arab Saudi.

#### **2.1. Tatanan Domestik Turki**

Dalam kerentanan stabilitas domestik dalam *Regional Security Complex Theory*, yang menjelaskan tatanan wilayah kawasan berdasarkan dengan letak geografis dan struktur pemerintah. Turki merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dengan benua Eropa. Turki memiliki luas wilayah negara seluas 814.578km persegi, dengan wilayah di Benua Asia sebesar 790.200km persegi sedangkan dalam wilayah benua Eropa sebesar 24.378km persegi. Letak geografis di Turki terletak di antara Anatolia dan Balkan dengan berbatasan laut hitam. Batas geografis Turki antara Yunani dengan Suriah berbatasan dengan laut Aegean dan laut Medeteranian. Turki merupakan sebuah negara yang menjadi kerajaan islam pertama, sehingga Turki dijuluki sebagai kiblat kerajaan umat islam karena masyarakat negara Turki mayoritas beragama islam. Turki merupakan negara republik yang dipimpin oleh Presiden sebagai

kepala negara melalui pemilihan umum yang dipilih oleh masyarakat (Muda 2023).



Gambar 2.1.1 Peta TURKI

Sumber : <https://images.app.goo.gl/3buL9TGkqcFcPdHv9>

Pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan yang semula menjadi Perdana Menteri Turki sejak tahun 2003 hingga 2014 dengan masa jabatan 3 periode. Kemudian Erdogan mencalonkan diri sebagai Presiden Pemerintah Turki melalui pemilihan umum. Erdogan memenangkan pemilihan presiden Bersama partai yang di didirikan Erdogan pada tahun 2001 yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan. Pada tahun 2014 Erdogan resmi terpilih menjadi Presiden Turki pertama kali yang dipilih melalui pemilu. Pada masa pemerintahan Erdogan, pertumbuhan perekonomian di Turki mengalami penurunan sejak tahun 2016. Krisis moneter yang terjadi di Turki dengan menurunnya ekonomi sebesar 2.9%, naiknya angka pengangguran sebanyak 10%, melemahnya nilai tukar mata uang di Turki, hingga menurunnya angka wisatawan di Turki merupakan dampak dari terjadinya konflik yang terjadi di Suriah, karena Turki merupakan negara yang berbatasan dengan Suriah (Arbar 2023).

Turki mendapatkan serangan dari etnis Kurdi sejak November 2015 hingga berakhir pada 7 Juni 2016. Etnis Kurdi melakukan penyerangan terhadap pemerintah Turki karena etnis Kurdi ingin mendapatkan hak kewarganegaraan yang diakui oleh pemerintah Turki. Aksi yang dilakukan oleh etnis Kurdi dengan menyerang wilayah Turki Tenggara di Genveydogu Anaddu Bolgesi di provinsi Anatolia yang merenggut korban sebanyak 466 jiwa. Penyerangan terus dilakukan oleh etnis Kurdi dalam memperjuangkan tujuan kelompoknya namun hanya berjalan selama 7 bulan, kemudian berakhir pada 7 Juni 2016. Penyerangan berakhir karena adanya kemunduran PKK (*Partiye Karkaren Kurdistan*) di wilayah terjadinya penyerangan. Kemudian Perdana Menteri Yildirim dan Presiden Turki Erdogan mendeklarasikan bahwa kemunduran PKK menjadi sebuah tanda bahwa serangan militer yang terjadi di Turki Tenggara telah selesai (Sahide n.d.).

Selanjutnya, Turki mengalami berbagai krisis di negaranya. Mulai dari krisis dalam perekonomian akibat dari perang Suriah yang menutup jalur perdagangan Turki sehingga menyebabkan penurunan perekonomian Turki. Kemudian krisis sosial politik yang disebabkan dengan adanya kudeta militer Turki pada tahun 2016. Faktor terjadinya kudeta militer Turki disebabkan adanya faktor historis dan faktor krisis sosial politik. Faktor yang mempengaruhi dengan adanya kejadian demonstrasi *The Gezi Park Protester* pada tahun 2013 antara etnis Kurdi dengan pemerintah Turki Presiden Erdogan. Faktor lainnya yang mempengaruhi adanya kudeta tersebut karena keinginan etnis Kurdi agar pemerintah Turki Erdogan mengembalikan tatanan politik dari Ottoman yang menjadi warisan pertama dan menjadikan ciri khas dari Turki sebagai kiblat umat

Muslim di Dunia agar tetap terjaga keasliannya dari pertama kali dicetuskan dan tidak berubah karena pengaruh modern (Sri Kurnia Sari n.d.).

Pasca terjadinya kudeta militer Turki pada tahun 2016, muncul adanya referendum Turki pada tahun 2017. Referendum tersebut yang akan menentukan kebijakan Presiden Erdogan dalam memimpin. Kemenangan atas referendum Erdogan pada 16 April 2017 mencapai 51.3% suara yang memilih serta sebesar 46.7% suara yang tidak memilih Erdogan dari 55juta masyarakat Turki yang memilih dengan 167.000 tempat pemungutan suara. Referendum membentuk adanya kebijakan baru tatanan pemerintah Turki (Christiastuti 2018).

Isi dari referendum Turki 2017 ialah :

- a. Menetapkan pemilihan Presiden pada periode berikutnya.
- b. Presiden memiliki kewenangan seperti menunjuk langsung pejabat tinggi pemerintahan, serta memiliki kewenangan untuk terlibat dalam keadilan di negara.
- c. Masa jabatan Presiden ialah 5 tahun dengan maksimal dua periode dalam menjadi pemimpin.

Adanya referendum tersebut, Presiden Erdogan menyampaikan upaya dalam mencegah agar tidak terjadi kudeta di Turki pada tahun berikutnya. Namun di Turki terbagi menjadi dua kubu antara pendukung dan yang tidak mendukung Erdogan. Kubu yang memilih Erdogan sebagai Presiden Turki menerima setiap keputusan kebijakan pemerintah, sedangkan sebesar 46.7% yang tidak memilih Erdogan dari 55juta masyarakat Turki menjadi pengkritik pemerintah yang mana berpengaruh dalam pemerintahan (Indonesia 2017).

Selain tatanan pemerintah Turki, adapun permasalahan yang terjadi di Turki yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Kurdi. Etnis Kurdi atau disebut dengan Suku Kurdi merupakan kelompok etnis Indo-Eropa (*European Tribes*) yang beragama Islam Sunni di wilayah Kurdistan. Kurdistan ialah sebutan dari etnis kurdi yang berarti tanah orang-orang Kurdi. Wilayah Kurdistan tersebar di berbagai wilayah kawasan Timur Tengah seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah. Etnis Kurdi yang berada di Turki merupakan kelompok etnis dengan populasi terbesar yang jumlahnya mencapai 30 juta jiwa. Tujuan dari etnis Kurdi ialah ingin membentuk sebuah negara untuk etnis Kurdi. Namun pemerintah Turki menolak adanya permintaan dari etnis Kurdi dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Turki menolak Kurdi dari wilayah Kurdistan yang ada di Turki, melarang Bahasa etnis kurdi dan budaya mereka, serta menjauhkan etnis Kurdi dalam politik pemerintah Turki. Etnis Kurdi melakukan pemberontakan dengan Pemerintah Turki sejak tahun 1925, 1930 dan pada tahun 1937 dengan tujuan menuntut Mustafa Kemal Attaruck untuk memberikan kemerdekaan etnis Kurdi (Sahide n.d).

Etnis Kurdi melakukan pemberontakan di wilayah Turki dengan membentuk *Partiye Karkaren Kurdistan*. Etnis Kurdi membuat rakitan bom, bom bunuh diri dalam melawan Turki, sehingga Turki menganggap bahwa etnis Kurdi merupakan teroris. Pemberontakan etnis Kurdi bertujuan agar etnis Kurdi mendapatkan hak kewarganegaraan di pemerintahan serta mendapatkan beberapa saham dalam sistem ekonomi politik pemerintah. Etnis Kurdi di Turki Tenggara memiliki sebuah organisasi kelompok yang masuk ke dalam daftar kelompok teroris internasional. Organisasi tersebut ialah *Partiye Karkaren Kurdistan* atau

disebut juga dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK). Pada tahun 2008 etnis Kurdi kembali menyerang Turki dengan melakukan serangan menghancurkan pasukan militer Turki pada Februari 2008 di Pegunungan Qandil. Pemberontakan tersebut membuat etnis Kurdi di Turki runtuh karena dalam melakukan aksinya, menewaskan beberapa anggota etnis Kurdi yang jumlahnya mencapai ratusan jiwa yang gugur dalam pemberontakannya melawan militer Turki.

*Partiye Karkaren Kurdistan* atau Partai Pekerja Kurdistan (PKK) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh etnis Kurdi yang dipimpin oleh Abdullah Ocalan pada 27 November 1978. *Partiye Karkaren Kurdistan* menganut ideologi dari Marxisme-Leninisme, yang memiliki tujuan utama ingin mendirikan negara Kurdi di wilayah Turki Tenggara. Sejak terbentuknya *Partiye Karkaren Kurdistan*, kelompok organisasi tersebut melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil Turki. Aksi yang dilakukan *Partiye Karkaren Kurdistan* disebut juga dengan aksi terror terhadap masyarakat Turki yang dapat dikategorikan dalam *national terrorist*. *National terrorist* dapat diartikan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang didasarkan untuk mendapatkan wilayah yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu, *Partiye Karkaren Kurdistan* tergolong ke dalam kelompok terorisme internasional (Titik Yulianingsih n.d).

*Partiye Karkaren Kurdistan* memiliki sistem dalam perekrutan anggota kelompoknya. Adapun beberapa langkah *Partiye Karkaren Kurdistan* dengan cara mendoktrin masyarakat etnis Kurdi untuk ikut serta dalam kelompok yang sudah dibentuk dalam memperjuangkan kepentingan yang sama, kemudian dengan memanfaatkan tokoh masyarakat yang berpengaruh agar menambah keyakinan

masyarakat etnis Kurdi untuk bergabung, langkah selanjutnya dengan cara mempublikasi doktrinisasi organisasi tersebut melalui media cetak seperti buku dan majalah dalam proses mencari anggota kelompok.

Turki merupakan negara yang berada di Benua Asia dan Benua Eropa. Yang beribukota di Ankara dengan sistem pemerintahannya yang dipimpin oleh Presiden dan Perdana Menteri. Konflik yang terjadi di Turki karena adanya etnis Kurdistan yang tinggal di wilayah Tenggara Turki menginginkan Kurdistan membentuk negara sendiri, namun Turki menolak hal tersebut sehingga terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Kurdi dengan pemerintah Turki. Adanya etnis Kurdi di Turki yang membentuk PKK membahayakan pemerintah Turki. Karena dapat mengganggu stabilitas tatanan domestik pemerintah Turki atas tujuan etnis Kurdi di wilayahnya dengan mengecam dan berupaya untuk mengusir etnis Kurdi yang ada di Turki.

## **2.2. Dinamika Hubungan Turki dengan Kawasan Timur Tengah**

Dalam sub bab ini akan menjelaskan mengenai hubungan dengan negara sekitar, yaitu indikator kedua dari konsep *Regional Security Complex Theory*. Disini Turki merupakan negara yang berada di antara Benua Asia dengan Benua Eropa yang berbatasan dengan wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Iran, Irak, dan Arab Saudi. Karena batas wilayah Turki yang berdekatan dengan Suriah membuat Turki terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah.

### *2.2.1. Konflik Suriah bagi Turki*

Pemberontakan yang terjadi di Suriah berlangsung sejak tahun 2011 akibat adanya ketidaksenangan masyarakat Suriah terhadap Pemerintahan Suriah pada masa kepemimpinan oleh Presiden Bashar Al-Assad. Masyarakat melakukan

demonstrasi kepada pemerintah Suriah dengan cara turun ke jalan dan melakukan penyerangan menggunakan berbagai senjata militer seperti menembakkan peluru dalam melaksanakan pemberontakan. Konflik tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Konflik Suriah tidak hanya perang saudara antar masyarakat Suriah, namun menjadi isu internasional karena melibatkan beberapa aktor negara lain. Turki adalah salah satu negara yang terlibat adanya konflik di Suriah, diduga keterlibatan Turki dipengaruhi dengan adanya faktor kesenjangan ekonomi yang semakin memporak-porandakan perekonomian pemerintah Turki sejak berlangsungnya konflik di Suriah.

Pada tahun 2011, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memutuskan untuk terlibat dalam konflik Suriah dengan menjadi oposisi kuat menolak rezim pemerintah Suriah pada masa Presiden Bashar Al-Assad. Erdogan memiliki tujuan atas keterlibatannya menjadi oposisi didasari dengan adanya etnis Kurdi di wilayah Turki yang menyerang Turki, sehingga Erdogan berkeinginan agar masyarakat Suriah kontra-rezim Bashar Al-Assad membantu kepentingan Turki. Diplomasi yang dilakukan oleh Erdogan tersebut menjadi Langkah awal dalam memperbaiki hubungan antara Turki dengan masyarakat Suriah. Ketika Bashar Al-Assad menghadapi situasi sulit dari banyaknya kecaman pemberontakan yang terjadi di Suriah, Turki menjadi penyelamat untuk masyarakat Suriah yang memberontak rezim Bashar Al-Assad dengan menyediakan tempat untuk pengungsi Suriah sebanyak 3.6juta rumah, serta memberikan bantuan militer dan politik. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Turki agar masyarakat sipil Suriah yang mengungsi dapat membantu Turki dalam menyerang *Partiye Karkaren Kurdistan* atau Partai Pekerja Kurdistan organisasi etnis Kurdi yang

mana menjadi lawan Turki sejak tahun 1925, Partai Pekerja Kurdistan merupakan organisasi kontra-Suriah. Oleh karena itu, salah satu tujuan pemerintah Turki terlibat dalam konflik Suriah agar meruntuhkan etnis Kurdi di wilayah Turki (Abdurrah n.d.).

Turki membuat kebijakan *open door policy* atau kebijakan buka pintu yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Suriah dengan memberikan bantuan kemanusiaan serta penghidupan yang layak. Pada tahun 2014, semakin banyaknya masyarakat sipil Suriah yang datang untuk mengungsi di wilayah Turki dengan jumlah yang mencapai hingga 1.5 juta jiwa. Atas kebijakan *open door policy* yang dibuat oleh pemerintah Turki menjadi isu dan menarik perhatian dalam dunia internasional. Sehingga menyebabkan beberapa aktor negara kawasan lainnya melihat bahwa konflik yang terjadi di Suriah bukan hanya disebabkan oleh masalah domestik negara Suriah saja, namun melibatkan negara kawasan di sekitar Suriah.

Terbentuknya *Free Syrian Army* (FSA) atau Organisasi Oposisi Bersenjata yang dibentuk pada tanggal 11 Juli 2012 oleh masyarakat sipil Suriah yaitu Riad Al-Assad yang bertujuan untuk melawan dan menjadi oposisi kuat dalam melawan rezim Bashae Al-Assad. *Free Syrian Army* terbagi menjadi beberapa kelompok. Diantaranya yaitu *Suriah Front Revolusioner* (SFR) yang memiliki anggota hingga 15.000 pasukan yang dipimpin oleh Jamal Maarouf yang terbentuk pada tahun 2103. *Free Syrian Army* memiliki markas besar yang berada di Turki. *Free Syrian Army* membuat strategi untuk melawan pemberontakan dengan merekrut masyarakat untuk bergabung, namun upaya tersebut gagal karena sumber daya yang tidak memadai. Sehingga kemudian *Free Syrian Army*

membentuk kelompok dengan berbagai gabungan dari negara lain yaitu *Supreme Military Command* (SMC) atau Dewan Komando Militer (Rahmasari n.d.).

*Supreme Military Command* diketuai oleh Brigadir Jenderal Salim Idriss. *Free Syrian Army* membuat konferensi di Antalya, Turki yang dihadiri beberapa komando dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Yordania. *Supreme Military Command* merupakan kelompok yang mendapat dukungan dari negara kawasan sekitar. Pada tanggal 24 Agustus 2016 Turki membentuk pasukan militer yang disebut *Turkish Armed Forces* (TAF) atau disebut dengan Angkatan Bersenjata Turki bersama *Free Syrian Army*. *Turkish Armed Forces* memiliki anggota sebanyak 4.000 pasukan, sedangkan *Free Syrian Army* memiliki anggota 7.000 pasukan. Pada tanggal 20 Januari 2018, *Turkish Armed Forces* dan *Free Syrian Army* membuat sebuah kebijakan yaitu *Operation Olive Branch* (OOB) di seluruh perbatasan wilayah Suriah. Tujuan Turki membentuk kebijakan *Operation Olive Branch* untuk menghilangkan kelompok teroris yang ada di perbatasan wilayah Turki. *Operation Olive Branch* juga dibentuk dengan tujuan untuk melindungi keamanan masyarakat Turki dari ancaman *Partiye Karkaren Kurdistan* (Rahmasari n.d.).

Konflik yang terjadi di Suriah menjadi anarkis karena tidak adanya struktur dalam konflik tersebut. Sehingga adanya kelompok *Partiye Karkaren Kurdistan* membahayakan pemerintah Turki karena *Kurdistan* semakin bergerak bebas dalam mencapai tujuannya tanpa adanya pengendalian dari Suriah. Selanjutnya membuat Turki membentuk adanya *Free Syrian Army*. Kepentingan nasional Turki dalam adanya *Free Syrian Army* ialah Turki merasa hal terpenting dalam pemerintahannya adalah mengusir etnis Kurdi dengan cara membuat

perlawanan dengan membentuk aliansi agar wilayah Turki tidak dikuasai oleh etnis Kurdi. Selain itu, tujuan Turki dengan mendukung *Free Syrian Army* dalam bidang militer yaitu keinginan Turki dalam membasmi teroris yang berada di wilayah Turki dan perbatasan Turki. Serta keinginan Turki mendukung adanya *Free Syrian Army* agar konflik di Suriah segera menemui titik terang perdamaian, karena Turki semakin keberatan dengan merebaknya pengungsi yang berbondong-bondong datang ke wilayah Turki. Hal tersebut berdampak pada perekonomian dan keamanan Turki.

### 2.2.2. Negara Timur Tengah di Suriah

#### a. ISIS

*Islamic State of Iraq and Syria* atau yang dikenal sebagai ISIS yang merupakan kelompok teroris yang berasal dari Al-Qaeda yang memiliki ideologi berbeda. ISIS merupakan Sunni Wahabi di daerah Timur Tengah yang terbentuk pada tahun 2004 di Irak yang memperjuangkan politik mereka dengan berambisi sebagai kelompok yang berkuasa atas seluruh umat islam yang ada di Dunia. ISIS juga mempunyai anggota kabinet dan struktur organisasi serta berbagai divisi (Tambunan n.d.).

Table 2.2.2.1 Struktur Organisasi ISIS tahun 2014



ISIS merupakan kelompok kontra dalam konflik Suriah. Keterlibatan ISIS dipengaruhi dengan adanya kekhawatiran Irak di wilayahnya akibat serangan udara Amerika Serikat di Suriah yang mempengaruhi keamanan Irak. Sehingga Irak membuat oposisi dengan memperkuat anggota ISIS dalam mengamankan semua tanah wilayah Irak beserta wilayah perbatasan Irak dengan Suriah. ISIS melakukan penyerangan terhadap kelompok Syiah di Suriah yang mendukung rezim pemerintah Bashar Al-Assad. ISIS tidak hanya menyerang kelompok Syiah di Suriah saja, namun beberapa masyarakat sipil Suriah juga mendapatkan serangan dari ISIS (Christiastuti 2019).

Perkembangan ISIS dalam konflik Suriah pada tahun 2014, ISIS berhasil mengambil wilayah Raqqa yang berada di Suriah kemudian dijadikan ISIS sebagai ibukota kekhalifan ISIS. Pada Juni 2014 ISIS juga berhasil menguasai wilayah Irak di Mosul dan Tirkit dengan menjadikan kota tersebut menjadi ibukota kekhalifan ISIS juga. Namun pada tahun yang bersamaan setelah ISIS berhasil menguasai Mosul, kemudian Amerika Serikat menyerang ISIS melalui serangan udara untuk menghancurkan kelompok radikal tersebut. Selanjutnya pada tahun 2016 ISIS kewalahan dalam melawan serangan dari Amerika Serikat sehingga membuat ISIS melepaskan wilayah yang pernah diambil alih.

Pada tahun 2017, Perdana Menteri Irak Haider-Al Abadi menyebutkan bahwa kekuasaan ISIS telah diambil alih kembali oleh pemerintah Irak sehingga menjadikan kekalahan terbesar ISIS pada tahun tersebut. Pada tahun 2018, Suriah juga berhasil mengambil alih kembali wilayah yang telah dikuasai oleh ISIS sebelumnya. ISIS mengalami kekalahan pada tahun 2017 dan tahun 2018 karena usaha pemerintah Irak dan Suriah yang berhasil mengambil alih wilayah

kekuasaannya kembali. Sehingga pada tahun 2019 menjadikan kekalahan ISIS secara keseluruhan karena wilayah kekuasaan ISIS yang hilang, dan hancurnya tujuan dari kelompok radikal tersebut dalam membentuk negara sebagai kekhalifannya pupus. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ISIS tidak lagi terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Turki merupakan negara yang membantu masyarakat sipil Suriah dalam melawan ISIS. Turki membentuk kelompok tentara militer yang beranggotakan masyarakat sipil Suriah kontra-Suriah atau disebut dengan *Syrian Democratic Forces* atau Pasukan Demokratik Suriah (SDF) untuk menyerang Turki. Syrian Democratic Forces terbentuk pada Oktober 2015 yang merupakan kelompok pemberontak rezim Bashar Al-Assad yang membantu Turki dalam melakukan pemberontakan. Tujuan keterlibatan pemerintah Turki dalam membantu meruntuhkan ISIS di Suriah agar wilayah perbatasan Turki yang berada di dekat Suriah Utara tidak dikuasai oleh ISIS dan etnis Kurdi.

#### b. Iran

Pada awal mula terjadinya konflik di Suriah, Iran membatasi negaranya dengan Suriah. Namun seiring berjalannya waktu, semakin tidak terkendali perang yang terjadi di Suriah membuat Iran tergugah sehingga memutuskan untuk terlibat dalam konflik di Suriah tersebut. Iran menjadi negara pro-Suriah dengan memberikan dukungan melalui militer yang dimiliki oleh Iran untuk Suriah. Pada tahun 2012, Iran membentuk kelompok Pasukan Pertahanan Nasional yang merupakan organisasi militer dengan beranggotakan 100.000 pasukan tentara untuk dikirim dalam membantu konflik di Suriah (Salyo Pranoto n.d.).

Faktor yang membuat Iran memutuskan untuk terlibat dalam konflik Suriah karena adanya bantuan yang pernah diberikan oleh Suriah pada masa lampau saat terjadinya perang Irak-Iran pada tahun 1980 hingga tahun 1988. Suriah merupakan negara yang pertama membantu Iran pada saat terjadinya perang tersebut. Aliansi Iran dengan Suriah mempengaruhi kebijakan pemerintah Iran dalam mempertahankan posisinya menjadi negara yang bisa menguasai Suriah. Seperti halnya Rusia yang mempunyai kepentingan nasional yang sama dengan Iran dalam pro-Suriah dan menjadi kubu aliansi pendukung rezim Bashar Al-Assad.

Pada tahun 2012 Iran memutuskan terlibat dalam konflik Suriah dengan memberikan bantuan kepada Suriah. Iran membentuk kelompok tentara militer yang diberi nama Pasukan Quds dibawah naungan oleh Jendral Qasem Sulaeymani dengan beranggotakan 100.000 jiwa dalam pembentukan Pasukan Pertahanan Nasional Iran yang mendukung rezim Bashar Al-Assad. Keterlibatan Iran dalam konflik di Suriah ialah bentuk terimakasih dan balas budi pemerintah Iran kepada pemerintah Suriah atas bantuan Suriah pada saat terjadinya perang Iran-Irak pada masa itu. Iran tidak hanya membantu Suriah dengan membentuk tentara militer saja, Iran juga membantu Suriah melalui Pasukan Quds dengan memberikan bantuan alat senjata berupa senapan, roket beserta alat peluncur roket untuk melancarkan aksinya dalam membantu Suriah melawan pemberontak rezim Bashar Al-Assad (Salyo Pranoto n.d.).

Keterlibatan Iran dengan Suriah menjadi sorotan Arab Saudi. Iran dengan Arab Saudi merupakan kedua negara yang mempunyai pandangan berbeda dalam agama Islam Sunni-Syiah. Masyarakat Iran mayoritas adalah Islam Sunni,

sedangkan di Arab Saudi dengan pengikut Islam Syiah. Adanya perbedaan tersebut terjadi perang dingin antara Iran dengan Arab Saudi. Berbeda dengan Turki, Pemerintah Turki, Erdogan menolak Tindakan yang dilakukan Iran dalam keterlibatannya dengan konflik di Suriah.

Hubungan Turki dengan Iran semakin memburuk karena Iran mendukung Islam Syiah Suriah melawan ISIS di Mosul. Sehingga membuat Erdogan untuk mengirimkan tank-tank ke perbatasan Irak yang bertujuan agar memperingatkan Iran untuk memilih berhenti dari keterlibatannya dengan konflik di Suriah supaya tidak menimbulkan perpecahan antara umat Islam Sunni dengan Islam Syiah. Faktor yang membuat Turki dan Iran berselisih karena adanya perbedaan pandangan dalam agama. Upaya yang dilakukan Iran dalam membantu Suriah menjadikan konflik semakin ricuh karena banyaknya aktor yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi masalah untuk pemerintah Turki yang mana wilayah Turki berbatasan dengan Suriah yang menyebabkan merebaknya pengungsian yang datang ke Turki untuk berlindung.

#### c. Arab Saudi

Arab Spring Suriah merupakan bentuk demonstrasi rakyat yang menginginkan agar pemerintah dapat merubah sistem pemerintahan yang lebih demokratis serta adil dalam perekonomian negaranya. Gerakan tersebut merupakan gerakan yang terbentuk sendiri dan tidak terorganisir dari pemerintah serta dalam melakukan demonstrasi tidak menggunakan alat senjata. Arab Spring Suriah berasal dari kota Deraa yang memiliki keinginan untuk meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad. Konflik di Suriah menjadi semakin rumit dengan adanya banyak aktor negara lain yang terlibat ke dalam perebutan kepentingan nasional

negara di Suriah. Seperti terlibatnya Amerika Serikat dan Rusia ke dalam konflik Suriah. Perebutan oposisi dan rezim di Suriah antara kekuatan global Amerika Serikat dan Rusia dengan kawasan sekitar Timur Tengah Arab Saudi dan Iran menjadi rumit dikarenakan perbedaan pandangan antara kedua kubu tersebut.

Keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah memiliki tujuan untuk menjatuhkan Bashar Al-Assad dari kepemimpinannya dengan menjadikan Suriah sebagai jalur perdagangan minyak Arab Saudi. Kepentingan Arab tersebut didukung oleh Amerika Serikat. Tidak hanya terlibat dalam konflik Suriah saja, Arab Saudi juga menjadi donatur dalam perang Yaman. Keterlibatan Arab Saudi dalam perang Yaman, Arab melawan pemberontakan yang mengancam regional wilayah Selatan Arab Saudi. Sedangkan di Suriah keterlibatannya dengan membantu memberontak ISIS melalui serangan udara. Arab Saudi dan Iran merupakan negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Sehingga dengan adanya perbedaan pendapat dari ideologi Sunni-Syiah membuat hubungan kedua negara tersebut tidak membaik dengan terjadinya *proxy war* di kawasan Timur Tengah.

Arab Saudi membuat aliansi antara Liga Arab dan Amerika Serikat untuk mengecam prinsip Bashar Al-Assad. Arab Saudi membuat kerjasama dengan Amerika Serikat untuk memanfaatkan Liga Arab dalam meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 2013, Liga Arab menerima delegasi dari Suriah dengan masuknya kelompok oposisi Muoz Al-Khotib. Kelompok oposisi tersebut meminta agar Amerika Serikat mempertimbangkan kembali dalam membuat sebuah kebijakan untuk terlibat dan berkoalisi dengan aktor negara lainnya. Sehingga keterlibatan Arab Saudi dalam

konflik Suriah dengan membantu masyarakat sipil Suriah kontra-Suriah dan menjadi donatur masyarakat sipil Suriah atas ketidaksenangan Arab Saudi dengan rezim pemerintahan Bashar Al-Assad (Mustahyun n.d.).

Turki dengan Arab Saudi merupakan negara yang memiliki keinginan yang sama untuk meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad serta memiliki kepentingan nasional negara yang sama dalam memberikan bantuan untuk masyarakat sipil Suriah yang kontra-Suriah dalam melakukan pemberontakan di Suriah. Atas kepentingan dua kubu negara antara Turki dengan Arab Saudi, kedua negara tersebut mendukung keterlibatan Amerika Serikat beserta sekutunya dalam melakukan penyerangan di Suriah serta upaya Amerika Serikat dalam meruntuhkan ISIS di Suriah. Adanya keterlibatan Arab Saudi dalam konflik Suriah membuat Turki semakin berkobar dalam melakukan penyerangan terhadap Suriah karena kepentingan kedua negara yang sama atas ketidaksenangan dengan rezim Bashar Al-Assad.

Turki merupakan sebuah negara yang menjadi kerajaan Islam pertama yang dijuluki sebagai kiblat umat muslim. Negara yang dipimpin oleh Presiden Rcep Tayyib Erdogan sejak tahun 2014 hingga saat ini mengalami beberapa hal dalam pemerintahannya. Dengan adanya keinginan etnis Kurdi yang ada di Turki untuk membentuk negara sendiri, dan keterlibatan Turki dalam konflik Suriah karena wilayah Turki berbatasan dengan Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya mengganggu stabilitas tatanan domestic Turki. Namun menjadikan beberapa negara kawasan sekitar Turki yang terlibat dengan kepentingan nasional yang berbeda. Seperti Irak, Iran, dan Arab Saudi. Irak dengan adanya ISIS yang kontra dengan Suriah sama seperti dengan Turki dan Arab Saudi. Namun

keberadaan ISIS mengancam kedua negara tersebut. Berbeda dengan Iran yang pro-Suriah dengan membantu Suriah dalam konflik yang terjadi di negaranya agar Bashar Al-Assad tidak dilengserkan.

Dilihat dari empat struktur variabel dalam Regional Security Complex Theory seperti boundary, anarchic structure, polarity dan social construction. Boundary atau batas yaitu batas wilayah kawasan sekitar Timur Tengah yang terlibat dalam konflik Suriah hanya berbatasan dengan wilayah tertentu tidak meluas ke wilayah lainnya. Anarchic Structure atau struktur yang ada di dalam kawasan Timur Tengah yaitu tidak adanya struktur yang terbentuk, sehingga setiap masing-masing negara bebas dalam menjalankan kepentingannya tanpa mendapatkan intervensi dari negara lain. Selanjutnya dalam polarity atau pola ialah multipolar atau terdiri dari dua atau lebih beberapa negara yang terlibat dalam konflik yang terjadi di Suriah. Sedangkan dalam struktur penting variabel yang terakhir ialah social construction yang mana hubungan dalam setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik di Suriah. Tidak semua negara satu sama lain memiliki hubungan kerjasama yang baik, adapula antar negara yang berselisih.

## **BAB 3**

### **ANALISIS DINAMIKA KEAMANAN TURKI DI KAWASAN SEKITAR DAN PERANAN KEKUATAN GLOBAL**

Dalam bab ini menjelaskan analisis lanjutan dari indikator dalam konsep *Regional Security Complex Theory*. Poin yang dibahas dalam bab ini adalah the region's interaction with neighboring regions atau interaksi satu kawasan dengan kawasan sekitar yang menjelaskan posisi Uni Eropa dan NATO. Selanjutnya poin the role of global powers in the region atau peran kekuatan global yang menjelaskan mengenai peran Amerika Serikat, Rusia, African Union, Commonwealth of Independent States, dan Shanghai Cooperation Organization dalam konflik di Suriah.

#### **3.1. Keberadaan Negara Kawasan Sekitar Turki**

Negara Turki terletak diantara wilayah Benua Asia dengan Benua Eropa yang berbatasan dengan wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Iran, Irak dan wilayah Benua Eropa yang berbatasan dengan Turki ialah Bulgaria dan Yunani di semenanjung Balkan. Dalam konflik yang terjadi di Suriah, negara lain yang terlibat seperti Uni Eropa sebagai kawasan sekitar Turki yang mana Turki terlibat dalam konflik tersebut. Tidak hanya negara kawasan sekitar Turki di Timur Tengah dan Eropa yang terlibat dalam konflik Suriah, namun banyak aktor internasional yang memiliki kekuatan politik paling berpengaruh dalam konflik di Suriah seperti Amerika Serikat dan Rusia.

### *3.1.1 Timur Tengah dan Afrika*

African Union atau Uni Afrika merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 9 Juli 2002 untuk mewakili 54 negara yang ada di benua Afrika. Uni Afrika menggantikan Organization of African Union (OAU) yang berdiri pada tahun 1963 yang bertujuan untuk melawan kolonialisme Uni Afrika yang berfokus pada sektor keamanan, Hak Asasi Manusia, demokrasi dan pengembangan wilayah perekonomian Afrika. Uni Afrika memiliki 50 anggota yang aktif dan 4 negara yang di bekukan. 50 negara yang aktif ialah Aljazair, Angola, Benin, Botswan, Burkina Faso, Burundi, Tanjung Verde, Kamerun, Chad, Komoro, Cote d'Ivoire, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, Djibouti, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Republik Sahrawi (Sahara Barat), Sao Tome dan Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sudan, Sudan Selatan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia dan

Zimbabwe. Sedangkan empat anggota yang dibekukan yaitu Guinea-Bissau, Madagaskar, Mesir, dan Republik Afrika Tengah. Guinea-Bissau dibekukan pasca kudeta yang terjadi di Guinea-Bissau pada tahun 2012. Madagaskar dibekukan karena adanya krisis politik yang terjadi di Madagaskar pada tahun 2009. Selanjutnya Mesir dibekukan pada tahun 2013 pasca kudeta Mesir. Dan Republik Afrika Tengah yang dibekukan pada tahun 2012 hingga 2013 karena adanya konflik di negaranya.

Konflik yang terjadi di Suriah menyita perhatian dari Uni Afrika. Peran Uni Afrika dalam konflik di Suriah yaitu dengan membuat pernyataan untuk negara yang melakukan penyerangan terhadap Suriah untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dari kepemimpinannya. Menurut Uni Afrika penggunaan bahan kimia dan senjata militer merupakan dilarang dalam hukum internasional yang mana Uni Eropa menekankan bahwa setiap negara harus mematuhi hukum internasional. Menurut Uni Afrika, solusi dan tindakan yang dapat dilakukan dalam konflik yang terjadi di Suriah yaitu dengan meningkatkan upaya internasional untuk menemukan solusi untuk kepentingan masyarakat Suriah dan menghormati integritas di Suriah. (Hospita 2018).

### *3.1.2 Timur Tengah, Asia dan Australia*

Hubungan Timur Tengah dengan Asia ditandai dengan terbentuknya organisasi Commonwealth of Independent States atau Persemakmuran Negara-Negara Merdeka didirikan pada tahun 2011 oleh Rusia. Persemakmuran Negara-Negara Merdeka semula bagian dari Uni Soviet. Negara yang tergabung dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka ialah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia,

Azerbaijan, Georgia, Moldova, Belarus, Rusia, Ukraina, dan Annerna. Tujuan dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka ialah mengoordinasikan kebijakan anggotanya dalam perekonomian, pertahanan, diplomasi luar negeri, kebijakan imigrasi, penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Negara anggota dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka yang terlibat dalam konflik di Suriah hanya Rusia. Dimana memiliki kepentingan nasional yaitu pro-Suriah yang mendukung keberadaan Presiden Suriah Bashar Al-Assad (Brittanica n.d.).

Timur tengah dan Australia memiliki hubungan kerjasama dalam perdagangan dan ekonomi. Hubungan kerjasama tersebut tertera pada perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara kawasan Teluk Arab seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA sejak tahun 2007. Kerjasama yang dilakukan oleh UEA dengan Australia sejumlah AUSS\$5.7 Miliar yang menjadi investasi terbesar ke-19 dalam bidang ekspor barang dan jasa. Selain dalam bidang perekonomian, terdapat kerjasama melalui pariwisata dan pendidikan dengan menjadikan investasi besar pada aset-aset Australia dalam pendanaan di Timur Tengah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain kerjasama dalam bidang ekonomi, adapun kerjasama lainnya antara Australia dan Timur Tengah yaitu dalam militer dan perdamaian. Australia membentuk kelompok organisasi yang disebut Angkatan Pertahanan Australia (ADF) yang memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian antara kedua negara tersebut, karena Timur Tengah merupakan negara yang identik dengan perang (Totman 2023).

### *3.1.3 Timur Tengah dan Eropa*

Pada Maret 1972, Suriah tergabung ke dalam organisasi negara penghasil minyak yang bernama *Organization of Arab Petroleum Exporting Countries*

(OAPEC) yang membuat Uni Eropa memiliki hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan Suriah. Berdasarkan hubungan kerjasama Uni Eropa dan Suriah, pada tahun 1995 terbentuk kesepakatan kerjasama perdagangan *Euro-Meditarian* yang terdiri dari beberapa negara kawasan Mediterania seperti Suriah, Aljazair, Mesir, Israel, Jordan, Otoritas Palestina, Lebanon, Maroko, Tunisia dan Turki. Uni Eropa melakukan ekspor ke Suriah pada tahun 2013 dan tahun 2017. Pada tahun 2013 Uni Eropa mengekspor sebesar 50.7% produk hasil pertanian, 18.2% bahan manufaktur kimia, dan 19.4% mesin peralatan transportasi kepada Suriah. Sedangkan pada tahun 2017, Uni Eropa mengekspor beberapa produk sebesar 32.3% hasil produk dalam sektor pertanian, 23.6% produk manufaktur bahan kimia, dan 18.8% mesin peralatan transportasi. Namun setelah adanya konflik yang terjadi di Suriah, Uni Eropa membatasi serta memberikan sanksi untuk Suriah terkait kerjasama yang terjalin antara dua negara tersebut dalam bidang ekonomi (Kurniawan n.d).

Uni Eropa membuat kebijakan dalam pemberian sanksi terhadap Suriah dalam bentuk pemutusan kerjasama dengan Suriah beserta pembekuan aset dan penyitaan alat senjata Suriah. Uni Eropa juga melarang Suriah untuk melakukan impor minyak mentah dan produk minyak bumi. Sanksi yang diberikan Uni Eropa kepada Suriah sejak tahun 2014 berlaku hingga Juni tahun 2019. Uni Eropa memberikan sanksi kepada pemerintah Suriah, namun berbeda dengan hubungan Uni Eropa dan masyarakat sipil Suriah. Uni Eropa memberikan bantuan dan perlindungan untuk masyarakat sipil Suriah seperti membentuk *European Neighbourhood Policy* atau Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP), *European*

*Commision Humanitarian Aid and Civil Protection* atau Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan (ECHO) dan *EU Regional Trust Fund* (Dunia n.d).

*European Neighbourhood Policy* atau Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP) merupakan kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dengan negara Timur dan Selatan Eropa dalam menangani kasus atau konflik negara kawasan sekitar Uni Eropa untuk mensejahterakan dan memberikan bantuan. *European Neighbourhood Policy* terbentuk pada tahun 2004 yang memiliki tiga tujuan utama dalam kebijakannya yaitu menstabilkan dalam pembangunan ekonomi, keamanan, migrasi dan mobilitas negara. Selanjutnya, *European Commision Humanitarian Aid and Civil Protection* (ECHO) atau disebut dengan Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan merupakan wadah penyedia bantuan kemanusiaan untuk kawasan sekitar Uni Eropa khususnya wilayah Timur dan Selatan Eropa. Bantuan kemanusiaan yang diberikan dari *European Commision Humanitarian Aid and Civil Protection* berupa bantuan makanan, bantuan tempat pengungsian, bantuan kesehatan, bantuan air dan sanitasi, serta bantuan dalam hal pendidikan. Sedangkan *EU Regional Trust Fund* merupakan kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa dalam konflik Suriah dengan menjadikan Uni Eropa sebagai sumber dana para pengungsi Suriah yang terbentuk pada Desember 2014 (Action 2021).

Konflik yang terjadi di Suriah menyebabkan masyarakat sipil Suriah pergi ke beberapa negara kawasan sekitar Suriah untuk mengungsi. Negara yang menjadi tujuannya ialah Yordania, Lebanon, Mesir, Turki dan wilayah Uni Eropa Utara. Adanya hal tersebut membuat Turki dengan Uni Eropa melakukan kerjasama dalam menangani pengungsian masyarakat Suriah di negaranya.

Kebijakan yang dibentuk Uni Eropa dengan Turki ialah *Open Door Policy* dan *Common European Asylum System (CEAS)*. Turki membuat *Open Door Policy* dengan memberikan wilayah pengungsian Suriah dengan tidak ada batasan waktu, namun kedatangan Suriah hanya dianggap tamu oleh Turki. Kebijakan *Open Door Policy* yang dibuat Turki memiliki landasan hukum *Law of Foreigner and International Protection (LFIP)* yang dibentuk oleh *Directorate General for Migration Management (DGMM)* (United n.d).

Uni Eropa membentuk kebijakan *Common European Asylum System (CEAS)* pada tahun 1999 sebagai sebuah aturan mengenai pengungsi yang ada di Uni Eropa. Pada 29 November 2015 Turki dan Uni Eropa membentuk kerjasama yang disebut *Joint Action Plan*. *Joint Action Plan* memiliki tujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Turki dengan Uni Eropa dalam menangani kasus merebaknya pengungsi yang datang dari Suriah ke Turki dan Uni Eropa. Atas pembentukan kerjasama tersebut, Uni Eropa dan Turki membentuk *Readmission Agreement* pada tanggal 7 Maret 2016. Isi dari *Readmission Agreement*:

1. Mengembalikan imigran yang illegal.
2. Uni Eropa memberikan tempat tinggal yang dilindungi secara hukum untuk pengungsi yang masuk di wilayahnya secara legal.
3. Mencegah masuknya pengungsi illegal di Turki dan Uni Eropa yang melalui jalur darat dan laut.
4. Memberikan bantuan dana untuk pengungsi yang ada di Turki dan Uni Eropa.

Keterlibatan Turki dan Uni Eropa dalam konflik Suriah dalam bentuk migrasi politik. Uni Eropa memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah

yang berada di Turki. Kebijakan yang dibuat Uni Eropa dalam hal tersebut memudahkan Turki dalam mengendalikan merebaknya pengungsi Suriah yang berbondong-bondong datang ke Turki. Karena banyaknya pengungsi yang datang, sehingga membuat Turki membutuhkan bantuan dari negara lain berupa dana ataupun bantuan logistik lainnya. Masuknya Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah di Turki membuat pemerintah Turki merasa tidak terbebani. Hal tersebut membuat Uni Eropa bergantung dengan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah. Karena Uni Eropa hanya memberikan fasilitas dengan mengirimkan bantuan kepada pengungsi yang ada di Turki agar tidak merebaknya pengungsi Suriah datang di wilayah Uni Eropa.

Selain Uni Eropa, NATO juga terlibat dalam konflik yang ada di Suriah. *North Atlantic Treaty Organization* atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) terbentuk pada 4 April 1949 yang ditandatangani oleh 12 negara di Washington DC, Amerika Serikat. NATO pada awalnya dibentuk untuk menghadapi serangan dari Uni Soviet kepada anggota non-komunis di Eropa Barat. NATO memiliki angkatan militer seperti 20 staf angkatan darat, 100 brigadir, 1.5juta pasukan militer, 35 divisi, 23.000 alat mortir, 14.000 tank, 4.500 pesawat tempur, 500 kapal perang dan 2.000 helikopter. Tujuan dari terbentuknya NATO ialah untuk menyelesaikan konflik negara anggota NATO, saling membantu negara yang tergabung jika mendapatkan serangan dari negara lain. Negara yang tergabung dalam NATO ialah Albania, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Czechia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara,

Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Swedia (Wulandari 2023).

Konflik di Suriah yang tidak menemukan titik terang membuat NATO mempertimbangkan untuk terlibat ke dalam konflik di Suriah. Pertimbangan anggota NATO dengan membentuk pertahanan udara di Suriah seperti yang dilakukan NATO dalam membantuk konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011. NATO terlibat dalam konflik Suriah untuk melindungi Turki dari pemberontakan yang terjadi karena Turki merupakan anggota dari NATO. Dalam situasi rumit konflik Suriah dengan banyaknya aktor yang terlibat, NATO melihat bahwa Rusia memiliki kekuatan besar dalam keterlibatannya di konflik Suriah. Sehingga atas persetujuan anggota NATO dan Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama pada tanggal 4 Desember 2012 untuk mengirim pasukan bersenjata dalam melawan Suriah untuk melindungi pertahanan Turki, karena letak geografis Turki yang berbatasan dengan Suriah sehingga berdampak pada pemerintah Turki.

Kebijakan NATO dalam konflik yang terjadi di Suriah hanya sebatas dalam melindungi keberadaan Turki karena Turki merupakan salah satu negara anggota NATO. Semakin meningkatnya konflik di Suriah membuat NATO mempertimbangkan kembali dalam membuat sebuah keputusan politik. Terlebih dengan adanya beberapa tentara Turki yang gugur saat melawan serangan udara negara kawasan sekitar di wilayah perbatasan Turki. Relasi hubungan Turki dengan NATO semakin melemah, karena kurangnya kepercayaan NATO dengan Turki. Hal tersebut dikarenakan Turki dinilai telah melenceng dari nilai-nilai demokrasi sejak kudeta yang terjadi di Turki. Oleh sebab itu Turki tidak mengharapkan dukungan militer dari Amerika Serikat maupun NATO. Namun

pada Oktober 2019, Turki melakukan serangan udara di wilayah perbatasan Turki Tenggara dengan Suriah Utara dengan tujuan agar Turki melindungi wilayahnya. Tetapi hal itu dikecam oleh NATO. Uni Eropa dan NATO meminta Turki agar tidak melakukan penyerangan secara sepihak tanpa intervensi dari Uni Eropa dan NATO karena Turki merupakan anggota dari NATO. Selanjutnya, NATO meminta Rusia dan Suriah agar mematuhi peraturan hukum internasional untuk tidak menyerang di perbatasan Turki, karena bukan termasuk ke dalam wilayah Suriah. Peringatan yang diberikan oleh NATO terhadap Turki dengan membuat kebijakan dengan adanya pasal 5 dalam NATO yang berarti bahwa setiap anggota militer yang melakukan serangan bersenjata apabila menjadi korban maka tindakan tersebut dianggap perlu membantu antar negara dalam anggota NATO.

#### *3.1.4 Timur Tengah dan Benua Amerika*

Hubungan Timur Tengah dengan Benua Amerika seperti Amerika Serikat dan Amerika Latin. Hubungan Amerika Serikat dengan Timur Tengah ditandai dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik di Suriah yang mana Amerika Serikat menjadi negara kontra-Suriah dengan keinginannya untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dari kepemimpinannya. Timur tengah merupakan kawasan yang sangat penting untuk Amerika Serikat yang mana wilayah Timur Tengah menjadi lintasan perdagangan Amerika Serikat. Sehingga menyebabkan Amerika Serikat terlibat dalam berbagai kejadian di negara kawasan Timur Tengah. Selain konflik yang terjadi di Suriah, Amerika juga melakukan invasi ke Iraq. Amerika Serikat juga memerangi kelompok ISIS dengan mengirimkan pasukan bersenjata di wilayah kekuasaan ISIS hingga memberikan senjata ke Israel dalam konflik yang terjadi dengan Palestina.

Sedangkan hubungan Timur Tengah dengan Amerika Latin seperti Brazil, Meksiko dan Argentina. Hubungan Timur Tengah dengan Argentina terdapat dalam kerjasama dalam bidang perdagangan dan investasi. Sedangkan hubungan Timur Tengah dengan Brazil dengan adanya bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi terutama pada minyak bumi dan hasil pertanian. Serta hubungan Timur Tengah dengan Meksiko ialah kerjasama dalam bidang perdagangan minyak. Hubungan Timur Tengah dengan Amerika Latin berfokus pada kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di negara tersebut (Anifa 2024).

### **3.2. Kekuatan Global dalam Konflik Suriah**

Dalam konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya melibatkan negara kawasan Timur Tengah terlibat, aktor internasional seperti Amerika Serikat dan Rusia terlibat dalam konflik tersebut yang memiliki kepentingan nasional berbeda di setiap negara. Dalam sub bab ini penulis menjelaskan peranan dan tujuan dari Amerika Serikat dan Rusia atas keterlibatannya dari konflik Suriah.

#### *3.2.1 Peran Amerika Serikat dalam Konflik Suriah*

Amerika Serikat merupakan negara yang berada di Benua Amerika, negara yang menggunakan sistem pemerintahan federal. Dalam sistem pemerintahannya terdiri beberapa lembaga yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang memiliki peran berbeda dalam setiap lembaga. Lembaga eksekutif Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden yang dipilih langsung melalui sistem pemilihan umum atau *Electoral College*. Lembaga legislatif Amerika Serikat terdiri dari dua bagian yaitu senator Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Lembaga yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat

sebagai hakim agung pengadilan di Amerika Serikat, dalam pemilihannya ditunjuk langsung oleh Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki luas wilayah sebesar 9.826.630m<sup>2</sup> yang berada di sebelah barat Samudera Pasifik dan wilayah timur berbatasan dengan Samudera Atlantik. Amerika Serikat merupakan negara terbesar ketiga di Dunia yang memiliki populasi masyarakat yang banyak, sehingga Amerika Serikat disebut dengan negara super power (Sicca 2021).

Amerika Serikat memutuskan terlibat dalam konflik Suriah pada tahun 2014 dengan tujuan untuk meruntuhkan rezim Presiden Bashar Al-Assad. Amerika Serikat membuat program pelatihan untuk masyarakat sipil Suriah yang kontra-Suriah. Amerika Serikat menyiapkan dana \$500 dengan menyiapkan alat senjata serta pelatihan pada 3.000 pasukan Suriah untuk melakukan pemberontakan terhadap Presiden Bashar Al-Assad. Selain membuat angkatan bersenjata, Amerika Serikat juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah berupa obat-obatan, makanan, air, pendidikan serta perlindungan hukum yang dibersamai oleh PBB seperti UNHCR dan UNICEF pada 27 September 2016. Pengungsi Suriah tersebar dalam beberapa wilayah seperti di negaranya sendiri Suriah, Turki dan Yordania. Pada tahun 2016 Amerika Serikat memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah di Suriah sebesar \$2.6 miliar dan berhasil membuat pelatihan militer yang diikuti oleh 3.000 masyarakat Suriah. Selain memberikan bantuan kepada Suriah, pada tahun 2016 Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar \$440juta untuk pengungsi Suriah yang berada di Turki. Selanjutnya bantuan Amerika Serikat yang diberikan untuk pengungsi Suriah di Yordania dengan memberikan bantuan hukum, bantuan kesehatan, dan bantuan pendidikan untuk masyarakat sipil Suriah (Puspaningrum 2021).

Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 merupakan konflik internal antara pemerintah Suriah dengan masyarakat sipil Suriah atas ketidaksenangan warga Suriah dengan kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad serta melibatkan beberapa aktor negara lain. Amerika Serikat menganggap bahwa konflik di Suriah merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Bashar Al-Assad. Pada 18 Agustus 2011, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama memberikan larangan untuk *Executive Order* dan warga Amerika Serikat dalam bidang ekonomi seperti investasi ke Suriah, ekspor-impor Amerika Serikat dengan Suriah, perdagangan minyak hingga pembekuan aset Suriah. Barrack Obama menuntut Presiden Suriah Bashar Al-Assad agar mundur dari jabatannya. *Executive Order* yang ditetapkan oleh Barrack Obama ialah Presiden Suriah beserta pejabat tinggi lainnya seperti Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Kepala Intelijen Militer Suriah, Direktur Direktorat Keamanan Politik (Dinar Hafidz n.d.).

Turki merupakan negara yang terlibat dalam konflik Suriah yang menjadi oposisi untuk meruntuhkan rezim Presiden Bashar Al-Assad sama halnya dengan keterlibatan Amerika Serikat. Turki dan Amerika Serikat merupakan negara anggota NATO yang terlibat dalam konflik Suriah. Turki dan Amerika Serikat menjalin hubungan diplomasi politik pasca Perang Dunia I pada tahun 1947 dengan membuat perjanjian kerjasama antara Turki dan Amerika Serikat untuk mendukung rakyat bebas dalam berdemokrasi dan bernegara. Selain kerjasama tersebut, hubungan Turki dengan Suriah semakin erat dengan tergabungnya kedua negara tersebut dalam NATO pada tahun 1952. Turki dan Amerika Serikat memiliki kepentingan yang berbeda dalam konflik Suriah, namun memiliki tujuan

yang sama untuk menurunkan Presiden Bashar Al-Assad dalam kepemimpinannya. Kehadiran Turki menjadi sangat penting oleh Amerika Serikat dalam keterlibatannya di konflik Suriah. Diduga dengan adanya hubungan tidak baik antara Iran dengan Amerika Serikat yang mana Iran merupakan negara pendukung rezim pemerintah Bashar Al-Assad membuat Amerika Serikat memutuskan untuk terlibat dalam konflik Suriah. Dengan menjadikan tameng Turki karena masuk dalam satu anggota NATO dan sebagai negara yang berbatasan dengan Suriah wilayah utara. Hal tersebut memudahkan intervensi Amerika Serikat dalam pemberontakannya di Suriah (Antara 2012).

Pada tanggal 15 Juli 2016 pasca gagalnya kudeta Turki, Turki meminta ekstradisi untuk *Fethullah Gullen* atau gerakan *Gullenisme* di Turki. Namun upaya tersebut ditolak oleh Amerika Serikat. Adanya penolakan tersebut membuat hubungan Turki dengan Amerika Serikat menjadi berselisih. Kemudian Turki membuat kebijakan pasca kudeta dengan menutup pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Turki dan melarang Amerika Serikat masuk dalam militer Turki di Incirlik. Tidak hanya dengan menutup pangkalan udara saja, Turki kemudian menangkap pastor Amerika Serikat yang bernama Andrew Brunson, karena diduga memiliki hubungan kerjasama dengan *Partiye Karkaren Kurdistan* dan *Gullenisme*. Andrew Brunson tertangkap saat menjadi mata-mata di Turki, hingga akhirnya Turki menetapkan Andrew Brunson sebagai teroris. Hubungan Amerika Serikat dengan Turki Kembali memanas, sehingga Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi kepada pejabat dan pemerintah Turki. Meskipun kedua negara tersebut berada dalam satu organisasi yang sama yaitu NATO serta memiliki tujuan yang sama dalam konflik Suriah untuk meruntuhkan rezim

Bashar Al-Assad, namun hubungan antara Amerika Serikat dan Turki berselisih pasca adanya kudeta di Turki dan penangkapan pastor Amerika Serikat, Andrew Brunson (Bernadette Arderi 2021).

Meskipun hubungan Amerika Serikat dengan Turki meregang karena adanya Gullenisme dengan adanya sanksi ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Turki. Namun hal itu tidak menjadikan Amerika Serikat untuk mengintervensi Turki karena adanya kerjasama yang sudah terjalin, serta kepentingan nasional Turki dan Amerika Serikat yang sama dalam konflik di Suriah, serta kedua negara tersebut merupakan bagian dari NATO. Hal tersebut membuat Amerika Serikat memberikan kebebasan kepada Turki agar tidak menghalangi kepentingan Amerika Serikat di Suriah, begitu halnya dengan kepentingan Turki itu sendiri dalam konflik yang terjadi di Suriah.

### *3.2.2 Peran Rusia dalam Konflik Suriah*

Rusia merupakan negara yang berada di antara Benua Asia dan Benua Eropa Timur. Serta batas wilayah barat yaitu Ukraina, Lithuania, Belarus, dan Finlandia. Umumnya wilayah Rusia dikelilingi oleh pegunungan. Rusia terbagi menjadi dua bagian yaitu Rusia Barat yang berada di daerah Eropa Timur dan Rusia Timur yang berada di daerah Asia. Dalam konflik yang terjadi di Suriah, terdapat beberapa aktor negara yang terlibat, seperti Rusia. Rusia terlibat dalam konflik Suriah sebagai negara yang mendukung adanya rezim pemerintah Bashar Al-Assad (Rizky Poetra n.d).

Sejak terjadinya konflik di Suriah, Rusia mengetahui akibat terjadinya pemberontakan karena adanya ketidaksenangan masyarakat Suriah terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad. Keputusan Rusia untuk terlibat sebagai

pendukung Suriah dengan cara meminta Bashar Al-Assad agar melakukan reformasi di negaranya untuk meredakan konflik. Karena konflik di Suriah semakin meluas dan rumit serta banyak negara yang terlibat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Upaya Rusia dalam meminta reformasi kepada Bashar Al-Assad mengalami kegagalan, karena banyaknya kelompok yang memberontak membuat pemerintah Suriah kewalahan. Rusia dan Suriah memiliki kedekatan sejak masa Uni Soviet pada saat Suriah pada masa pemerintahan Hafez Al-Assad yang merupakan ayah dari Bashar Al-Assad. Oleh karena itu, membuat Rusia terlibat untuk membantu Suriah.

Selama konflik di Suriah, Rusia membuat keputusan bahwa masalah di Suriah merupakan kebijakan politik luar negeri Rusia. Rusia memberikan peraturan kepada Suriah dalam keterlibatannya dalam konflik di Suriah. Peraturan yang dibuat Rusia ialah :

- a) *Responsibility to protect*, upaya dalam menangani konflik dengan memfasilitasi pihak yang terlibat dalam memperkuat stabilitas pemerintah setiap negara yang terlibat agar keadaan menjadi kondusif tidak semakin rumit.
- b) Upaya Rusia dalam mencegah perubahan rezim Bashar Al-Assad menjadi militer dalam menyelesaikan konflik di Suriah.
- c) Upaya Rusia untuk melemahkan kekuatan kelompok oposisi yang terlibat dalam konflik dengan memperkuat Suriah dalam mempertahankan rezim Bashar Al-Assad.

d) Rusia membuat forum perundingan dengan negara kawasan sekitar Suriah seperti Turki dan Iran agar terciptanya perdamaian (Rizki Poetra Phoenna n.d.).

Langkah yang dibuat Rusia dalam diplomasi dengan negara kawasan sekitar mengalami kegagalan dikarenakan adanya faktor yang memperkuat alasan keterlibatan dari negara-negara dalam konflik Suriah. Hal tersebut membuat Rusia memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer dalam usahanya membantu Suriah untuk mempertahankan pemerintahannya. Ada beberapa faktor yang membuat Rusia memutuskan untuk mengambil keputusan menggunakan kekuatan militer. Diantaranya Rusia menganggap bahwa serangan dari beberapa kelompok merupakan ancaman yang mengganggu stabilitas regional dan global, perubahan rezim pemerintah Suriah yang mempengaruhi kepentingan Rusia, sehingga penggunaan militer merupakan sebuah keputusan yang tepat untuk Rusia dalam mempertahankan Suriah. Faktor lainnya yang mendorong keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah selain hubungan persahabatan antara Rusia dengan Suriah ialah bahwa Suriah merupakan negara yang menguntungkan untuk Rusia dalam faktor politik dan ekonomi.

Turki dan Rusia memiliki hubungan yang tidak baik sejak tahun 1568. Hal tersebut dikarenakan adanya persaingan Turki dengan Rusia. Persaingan tersebut disebabkan oleh pengaruh dari dunia barat di Turki wilayah Eropa Tenggara pada masa kekuasaan Turki Utsmaniyah. Pada tahun 1999 Turki memiliki hubungan kerjasama dengan Rusia dalam bidang diplomasi ekonomi yang tertera dalam deklarasi bersama anti terorisme yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Turki Bulent Ecevit dan pemerintah Rusia pada tanggal 5 November 1999, kesepakatan

tersebut untuk Proyek Blue Stream. Pada tahun 2008 hingga tahun 2009 hubungan kedua negara tersebut semakin membaik dengan terbentuknya kerjasama lainnya. Kerjasama Turki dan Rusia dalam bidang perekonomian semakin meningkat 26% dikarenakan Turki mengimpor minyak gas ke Rusia. Tetapi pada tahun 2011 hubungan Turki dengan Rusia menjadi berselisih karena adanya konflik yang terjadi di Suriah, yang membuat masing-masing negara memutuskan untuk terlibat dalam konflik Suriah dengan kepentingan nasional yang berbeda (Rizka Azizah Yusup n.d.).

Pada tanggal 24 November 2015 menjadi penyebab utama perselisihan antara Turki dengan Rusia karena adanya pesawat SU-24 milik Rusia ditembak oleh pesawat tempur F-16 milik Turki di ketinggian 6.000 meter pada perbatasan Turki. Atas insiden tersebut, Erdogan selaku Presiden Turki memberikan pernyataan bahwa semua negara yang terlibat dalam konflik Suriah dalam melakukan aksinya agar menghormati Turki dalam melindungi wilayahnya. Pernyataan tersebut di dukung oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jenderal Jens Stoltenberg. Pasca insiden penembakan pesawat tempur Rusia di wilayah Turki, membuat Rusia semakin memperkuat pertahanannya dengan mengirimkan kapal perang di pantai Suriah sekitar Latakia. Pada tanggal 29 November 2015, Rusia memberikan sanksi kepada Turki akibat insiden yang terjadi pada 24 November 2015 lalu. Sanksi yang diberikan ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin berupa pembatasan impor dari Turki, dan membatasi dalam sektor wisata dengan memberhentikan penjualan tiket wisata ke Turki (Detik 2013).

Perselisihan yang terjadi antara Turki dan Rusia tidak mengganggu stabilitas pemerintah antara kedua negara tersebut. Karena kedua negara tersebut memiliki

kepentingan nasional yang berbeda, yang mana Turki menjadi kelompok kontra Suriah, sedangkan Rusia menjadi kelompok pro-Suriah. Atas perbedaan kepentingan serta hubungan diplomasi Turki dan Rusia yang renggang, Rusia tidak ikut campur tangan dan menyerang Turki. Kedua negara tersebut menjalankan kepentingan masing-masing dalam konflik tersebut.

Konflik yang terjadi di Suriah melibatkan kawasan sekitar Turki seperti keterlibatan Uni Eropa dalam hal migrasi dan NATO. Keterlibatan Uni Eropa dalam konflik Suriah dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada pengungsi Suriah yang mengungsi di Turki dan wilayah Uni Eropa. Sedangkan keterlibatan NATO dalam konflik tersebut untuk melindungi anggota NATO yang terlibat seperti Turki dan Amerika Serikat. Selanjutnya keterlibatan kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Rusia memiliki kepentingan berbeda. Amerika Serikat yang didukung oleh NATO karena ketidaksenangannya terhadap Bashar Al-Assad dengan melakukan penyerangan kepada Suriah. Sementara Rusia ialah negara pro-Suriah yang mana Rusia membantu Suriah dalam perang yang terjadi dalam mengatasi serangan dari beberapa negara kontra Suriah karena adanya hubungan timbal balik Rusia dengan Suriah.

### *3.2.3 Peran Shanghai Cooperation Organization dalam Konflik Suriah*

Shanghai Cooperation Organization atau Organisasi Kerjasama Shanghai adalah organisasi yang terbentuk pada 15 Juli 2001 di Beijing yang memiliki tujuan untuk memperkuat hubungan bertetangga yang baik, bersahabat dan saling percaya di antara negara-negara anggota dengan upaya bersama untuk melindungi keamanan dan stabilitas regional, melindungi perdamaian, melawan terorisme radikalisme separatisme dan kejahatan terorganisir, serta memperkuat kerjasama

dalam bidang politik ekonomi. Anggota Organisasi Kerjasama Shanghai ialah Republik Rakyat Cina, Rusia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, India, Pakistan, dan Iran (Putra 2018).

Dalam konflik yang terjadi di Suriah anggota Organisasi Kerjasama Shanghai yang terlibat ialah Rusia, Iran dan Cina. Keterlibatan Cina dalam konflik di Suriah sama halnya dengan Rusia yaitu sebagai negara pro-Suriah yang mendukung keberadaan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Pada saat Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Suriah dalam hal kerjasama ekonomi minyak mentah, menjadikan peluang untuk Cina melakukan kerjasama dengan Suriah di bidang minyak mentah. Cina menjadi pemegang saham dalam dua perusahaan minyak terbesar di Suriah pada China National Petroleum Corporation (CNPC). Selain kerjasama Cina dan Suriah dalam hal perekonomian, Cina juga membantu Suriah dalam penyelesaian konflik di negaranya dengan memberikan bantuan senjata kepada Suriah untuk melawan pemberontak dalam konflik yang terjadi di negaranya (Affairs n.d.).

Turki memiliki hubungan diplomasi dengan Organisasi Kerjasama Shanghai yang bernama “Status Mitra Dialog Organisasi Kerjasama Shanghai” pada KTT Dushanbe tahun 2008. Tujuan Turki menjadi mitra kerjasama dengan SCO sebagai pengamat kerjasama hubungan antar negara dan internasional. Pada 23 Maret 2011 Turki mengajukan permohonan untuk menjadi mitra dalam Organisasi Kerjasama Shanghai. Permohonan dari Turki disetujui oleh Organisasi Kerjasama Shanghai menjadi mitra dialog di Almaty yang ditandatangani tanggal 26 April 2013. Hubungan diplomasi tersebut meningkatkan kerjasama antara Turki dengan SCO dalam berbagai bidang. Terutama dalam bidang keamanan

regional, perdagangan narkoba dan pencegahan kejahatan terorganisir, perang melawan teroris, serta dalam bidang ekonomi dan budaya.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **2.1. Kesimpulan**

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari analisis yang ditulis pada bab sebelumnya berdasarkan empat struktur penting dalam *Regional Security Complex Theory* yaitu boundary atau batas, anarchic structure atau struktur anarkis, polarity atau polaritas, dan social construction atau konstruksi sosial. Empat variabel tersebut relevan dengan dinamika keterlibatan Turki dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Struktur yang pertama ialah batas atau boundary yang membedakan Dalam keamanan regional domestic dengan sekitar. Dalam penelitian ini penulis

menyimpulkan bahwa dalam boundary atau batas konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 hanya berada di wilayah Suriah saja tidak meluas ke wilayah lain, namun konflik tersebut menjadi sorotan dalam dunia internasional karena banyak yang mendapatkan dampak dari adanya konflik tersebut sehingga membuat banyaknya aktor negara lain terlibat seperti Irak, Iran, Arab Saudi, Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, Australia, Amerika Latin, Tiongkok, dan Uni Afrika yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda dalam konflik yang terjadi di Suriah.

Struktur kedua ialah struktur anarkis atau anarchic structure yang berarti bahwa keamanan dalam regional harus terdiri dari dua atau lebih unit. Di dalam konflik Suriah tidak ada struktur hierarkis yang berjalan. Sehingga semua aktor yang terlibat dalam konflik Suriah memiliki kepentingan yang berbeda tanpa adanya intervensi antara satu sama lain. Seperti halnya hubungan Turki dengan Amerika Serikat. Keduanya merupakan anggota NATO yang terlibat dalam konflik Suriah. Namun, memiliki tujuan keterlibatan yang berbeda. Turki dengan kepentingannya untuk mengusir etnis Kurdi dari wilayahnya dan dalam mempertahankan perekonomian negara yang berdampak akibat dari konflik tersebut. Sedangkan keterlibatan Amerika Serikat ialah keinginan agar meruntuhkan rivalnya yaitu Iran yang merupakan negara pro-rezim Bashar Al-Assad, sehingga membuat Amerika Serikat terlibat. Selain negara tersebut, keterlibatan Irak, Arab Saudi, dan juga Rusia memiliki kepentingan yang berbeda. Tidak adanya struktur tersebut membuat keadaan di Suriah semakin rumit terpecah belah dengan banyaknya intervensi dari beberapa negara kawasan sekitar dan global. Sedangkan hubungan Timur Tengah dengan Tiongkok merupakan

kerjasama dalam bidang keamanan internasional. Hubungan Timur Tengah dengan Amerika Latin seperti Argentina, Brazil dan Meksiko merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi perdagangan. Selanjutnya hubungan Timur Tengah dengan Uni Afrika yaitu dalam bentuk pendanaan infrastruktur.

Selanjutnya pada struktur yang ketiga ialah polaritas atau polarity yang meliputi distribusi kekuasaan antar unit. Dimana pola yang terjadi dalam konflik Suriah ialah multipolar karena tidak ada negara yang mendominasi dengan kekuatan terbesar. Aktor yang terlibat memiliki kekuatan dalam kepentingannya tanpa mencampuri negara lainnya. Seperti Amerika Serikat dan Turki, kedua negara tersebut merupakan anggota NATO, namun memiliki kepentingan yang berbeda dalam keterlibatannya di konflik Suriah.

Sedangkan dalam struktur penting *Regional Security Complex Theory* yang terakhir konstruksi sosial atau social construction yang berarti bahwa struktur pola hubungan antar unit ialah hubungan antar negara yang terlibat tidak semua memiliki hubungan baik, bahkan terdapat beberapa negara yang terlibat berselisih. Seperti hubungan Turki dengan Irak, dengan terbentuknya ISIS yang terlibat dalam konflik Suriah membuat Turki membantu masyarakat sipil Suriah membantu melawan ISIS. Begitu juga hubungan Turki dengan Iran yang berselisih karena adanya perbedaan pandangan dalam agama Sunni-Syiah. Sedangkan hubungan Turki dengan Arab Saudi memiliki tujuan yang sama dalam konflik Suriah yaitu untuk meruntuhkan pemerintahan Suriah masa Bashar Al-Assad.

Selanjutnya, hubungan Turki dengan kawasan sekitar yaitu Uni Eropa yang memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi pengungsi Suriah yang ada di

Turki dengan membantu memberikan bantuan dan penghidupan yang layak. Sedangkan hubungan Turki dengan aktor internasional seperti Amerika Serikat dan Rusia dalam konflik Suriah memiliki tujuan yang sama seperti hubungan Turki dengan Arab Saudi untuk meruntuhkan rezim Bashar Al-Assad, karena Amerika Serikat dan Turki tergabung dalam NATO. Sedangkan hubungan Turki dengan Rusia berselisih dalam terjadinya konflik Suriah karena adanya pemutusan kerjasama yang terjalin sebelumnya dan perbedaan pandangan dalam konflik Suriah. Rusia menjadi negara yang mendukung adanya rezim Bashar Al-Assad, sedangkan Turki adalah negara oposisi rezim Bashar Al-Assad.

Dari empat struktur penting *Regional Security Complex Theory* dapat dilihat bahwa keadaan Turki dalam konflik Suriah menjadi penting di dalam pemerintah Turki dalam stabilitas tatanan domestik. Kepentingan Turki tersebut di dasari dengan adanya lintasan perbatasan Turki yang dilalui oleh beberapa negara yang terlibat dalam konflik di Suriah, dan tujuan Turki untuk mengusir etnis Kurdi di wilayahnya dengan memanfaatkan keadaan yang sedang terjadi namun menjadi ancaman terhadap Turki atas pemberontakan yang dilakukan oleh Kurdistan. Sehingga Turki membentuk benteng pertahanan dengan melakukan berbagai upaya agar mencegah tujuan etnis Kurdi di Turki.

## **2.2 Rekomendasi**

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut, dalam penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan penulis dalam meneliti sebuah isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis hanya meneliti keterlibatan Turki dalam konflik Suriah serta peran negara Kawasan sekitar dan kekuatan global dalam konflik suriah pasca hilangnya kekuasaan ISIS tahun 2014 hingga 2019 menggunakan

*Regional Security Complex Theory*. Dengan adanya saran dan rekomendasi, beberapa rekomendasi dari penulis yaitu untuk menjelaskan keterlibatan Turki dalam konflik Suriah pasca tahun 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Adib Khairil Musthafa, Hanik Purwati. n.d. "Sejarah dan Transformasi Politik Turki : Pergulatan Sekularisme dan Islamisme."
- Danar Hafidz Adi Wardhana, Dewi Nurlailah, M.Sajidin, Rezky Ramadhan Antuli. n.d. "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Konflik Suriah sebagai Konsekuensi dari Politik Engtangling Alliance."
- Kurniawan, Hilmy Yusuf. n.d. "Dinamika Hubungan Kerjasama Antara Uni Eropa dengan Turki dalam Menangani Pengungsi Suriah 2016-2017."
- LUERDE, Universitas Abdurrab. n.d. "Intervensi Turki dalam Krisis Suriah 2011-2014."
- Mustahyun. n.d. "Rivalitas Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah pada Arab Spring Suriah tahun 2011-2016."
- Putra, Rizka Perdana. 2015. "KEBIJAKAN LUAR NEGERI CINA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN 2011-2014." ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 38-43.
- Rahmasari, Nur Aisyah Eka. n.d. "Kepentingan Turki dalam Mendukung Free Syrian Army (FSA) di Suriah Tahun 2015-2019."
- Rendra, Dwi Suta Mentari. n.d. "Keterlibatan Turki dalam Konflik Suriah pada Tahun 2011-2012."
- Riezky Poetra Phoenna, Chandra Purnama, Windy Dermawan. n.d. "Peran Nasional Rusia Terhadap Konflik Suriah 2015-2020."

- Rini, Endang Agus Setya. n.d. "Keterkaitan Konflik Sunni-Syiah dalam konflik Suriah pada masa Bashar 2011-2016."
- Riska Azizah Yusup, Arya Sandhiyuda. n.d. "Normalisasi Hubungan Turki dan Rusia. Dampaknya Terhadap Konflik di Suriah."
- Sahide, Ahmad. n.d. "Suku Kurdi dan Potensi Politik di Timur Tengah."
- Sahla Rizki Deovanka, Ibnu Zulian. n.d. "Analisis Kepentingan Nasional Amerika Serikat dan Rusia dalam Konflik Suriah 2013-2018."
- Salyo Pranoto, M.H. n.d. "Keterlibatan Iran di Suriah : Babak baru revitalisasi pengaruh Iran pasca hengkangnya Amerika Serikat dari Suriah."
- Sri Kurnia Sari, A. Arifin. n.d. "Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016."
- Syarif Bahaudin Mudore, Nurlaila Safitri. n.d. "Dinamika Perang Suriah : Aktor dan Kepentingan ."
- Tambunan, Fernando PM. n.d. "SEJARAH DAN IDEOLOGI ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SHAM)." 1-13.
- Theresia, Evelyne. n.d. "Kajian Hukum Internasional Tentang Peran NATO dalam Operasi Perdamaian di Timur Tengah."
- Titik Yulianingsih, Dian Sumela Utami, Khofifa Naimi. n.d. "Eksistensi Partiya Karkaren Kurdistan (PKK) sebagai Gerakan Separatisme di Turki."

## **Buku**

- Paul, Bil. 2007. *Future Energy : How the New Oil Industry Will Change People, Politics and Portfolios*. Hoboken.

## **Website**

- Action, European Union External. 2021. *European Neighbourhood Policy*. Juli 29. Accessed Juli 29, 2024.  
[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan\\_Suriah\\_dengan\\_Uni\\_Eropa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Suriah_dengan_Uni_Eropa).
- Affairs, Republic of Turkiye Ministry of Foreign. n.d. *Shanghai Cooperation Organisation*. Accessed Agustus 25, 2024.  
<https://www.mfa.gov.tr/shanghai-cooperation-organization.en.mfa>.
- Arbar, Thea Fathanah. 2023. *Mengenal Erdogan : Presiden 3 Periode, Pimpin Turki 20 Tahun*. Mei 29. Accessed Juli 28, 2024.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529101346-4-441348/mengenal-erdogan-presiden-3-periode-pimpin-turki-20-tahun>.
- Britannica. n.d. *Commonwealth of Independent States*. Accessed Agustus 25, 2024. <https://www.britannica.com/topic/Commonwealth-of-Independent-States>.
- Christiastuti, Novi. 2018. *Pencapaian Erdogan Selama 15 Tahun Terakhir Berkuasa di Turki*. Juni 23. Accessed Juli 28, 2024.

- <https://news.detik.com/internasional/d-4080016/pencapaian-erdogan-selama-15-tahun-terakhir-berkuasa-di-turki>.
- Christiastuti, Novi. 2019. Akhirnya Kalah Total, Begini Awal Sejarah Kemunculan dan Jatuhnya ISIS. Maret 25. Accessed Juli 29, 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-4481924/akhirnya-kalah-total-begini-awal-sejarah-kemunculan-dan-jatuhnya-isis>.
- Conversation, The. 2018. Konflik Suriah : siapa yang terlibat dan apa kepentingan mereka? April 17. Accessed Juli 28, 2024. Berita website <https://theconversation.com/konflik-suriah-siapa-yang-terlibat-dan-apa-kepentingan-mereka-95065>.
- Dunia, Ensiklopedia. n.d. Hubungan Suriah dengan Uni Eropa. [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan\\_Suriah\\_dengan\\_Uni\\_Eropa](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Hubungan_Suriah_dengan_Uni_Eropa).
- Hardoko, Ervan. 2018. Arab Saudi dan Turki Dukung Serangan AS. April 14. Accessed Juli 29, 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2018/04/14/19311781/arab-saudi-dan-turki-dukung-serangan-as-ke-suriah>.
- Hospita, Maria Elisa. 2018. Uni Afrika desak solusi politik untuk krisis Suriah . April 16. Accessed Agustus 25, 2024. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/uni-afrika-desak-solusi-politik-untuk-krisis-suriah/1119389>.
- Indonesia, BBC News. 2017. Referendum Turki mendukung wewenang baru untuk presiden. April 17. Accessed Juli 28, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39616950>.
- Indonesia, CNN. 2017. Turki Dukung Pemberontak Suriah Lawan Jihadis. Oktober 8. Accessed Juli 29, 2024. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171008110323-120-246897/turki-dukung-pemberontak-suriah-lawan-jihadis> .
- Jones, Dorian. 2016. Ketegangan antara Iran dan Turki Meningkatkan soal Suriah dan Irak. Desember 12. Accessed Juli 29, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/ketegangan-antara-iran-dan-turki-meningkat-soal-suriah-dan-irak/3632018.html>.
- Muda, Geografi. 2023. Geografi Negara Turki. Februari 13. Accessed Juli 30, 2024. <https://www.geografi.org/2023/02/geografi-negara-turki.html>.
- n.d.
- News, Detik. 2013. NATO Pertimbangkan Aksi Militer ke Suriah. Maret 20. Accessed Juli 30, 2024. <https://news.detik.com/internasional/d-2198637/nato-pertimbangkan-aksi-militer-ke-suriah>.
- Puspaningrum, Bernadette Aderi. 2021. Bentuk Pemerintahan Amerika Serikat, Lembaga Negara hingga Lokal. November 10. Accessed Juli 30, 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2021/11/10/100000370/bentuk-pemerintahan-amerika-serikat-lembaga-negara-hingga-lokal?page=all>.
- Sicca, Shintaloka Pradita. 2021. Letak Geografis Amerika Serikat dan Fakta Menariknya. April 21. Accessed Juli 30, 2024. <https://internasional.kompas.com/read/2021/04/11/075714270/letak-geografis-amerika-serikat-dan-fakta-menariknya#:~:text=Letak%20geografis%20Amerika%20Serikat%20di,ti mur%20berbatasan>.
- Sumbar, Antara. 2012. Pengerahan Patriot oleh NATO Menuju Keterlibatan di Suriah. Desember 7. Accessed Juli 30, 2024.

- <https://sumbar.antaranews.com/berita/10158/pengerahan-patriot-oleh-nato-menuju-keterlibatan-di-suriah> .
- United, European. n.d. Humanitarian aid and civil protection. Accessed Juli 29, 2024. [https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection\\_en](https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection_en).
- Wulandari, Trisna. 2023. 31 Member States of NATO dan 12 Negara Anggota Pendiri. Agustus 1. Accessed Juli 29, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6851581/31-member-states-of-nato-dan-12-negara-anggota-pendiri>.

- Anifa, Rezah. 2024. *Hubungan Amerika Latin dan Timur Tengah dalam Dinamika Global*. 11 Juni. Accessed Agustus 27, 2024. <https://kumparan.com/rezah-anifa/hubungan-amerika-latin-dan-timur-tengah-dalam-dinamika-global-22uToIUL91U>.
- Totman, Profesor Sally. 2023. *Menelaah Hubungan Australia dengan Timur Tengah*. 19 September. Accessed Agustus 27, 2024. <https://www.internationalaffairs.org.au>.